



PROCEEDING

**SEMINAR NASIONAL BUSINESS, GOVERNMENT, AND THE PUBLIC:
OPTIMALISASI GOVERNANSI-BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) DI
ERA DISRUPTIF DAN GOVERNANSI DIGITAL UNTUK MEWUJUD-
KAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN**



28 November 2018

Editor

Dr. Ulber Silalahi, MA.

Dr. Banowati Talim, M.Si.

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

**Centre for Public Policy and Management Studies
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan**

ISSN: 2655 - 2582

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

**BUSINESS, GOVERNMENT, AND THE PUBLIC:
OPTIMALISASI GOVERNMENT-BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) di ERA DISRUPTIF DAN
GOVERNANSI DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL BERKELANJUTAN**

Editor:

Dr. Ulber Silalahi, MA.

Dr. Banowati Talim, M.Si.

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

CENTRE FOR PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT STUDIES

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Judul:

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL:
BUSINESS, GOVERNMENT, AND THE PUBLIC: OPTIMALISASI GOVERNMENT-BUSINESS
PARTNERSHIP (GBPs) di ERA DISRUPTIF DAN GOVERNANSI DIGITAL UNTUK
MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL BERKELANJUTAN**

Editor:

Dr. Ulber Silalahi, MA.

Dr. Banowati Talim, M.Si.

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

Sampul dan Tata Letak Isi:

William Tandi Wijaya

Laras Ambarsari

ISSN: 2655 - 2582

Penerbit:

Cetakan I : 2018

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR	i
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN 1 ASPEK KONTEKSTUAL KEMITRAAN	
PERAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DALAM ERA GLOBAL DAN DIGITAL (Prof. Dr. Eko Prasajo, Ketua Indonesia Association for Public Administration)	1
PENINGKATAN HASIL USAHA PERTANIAN MELALUI PENDEKATAN RANTAI PASOK INTEGRATIF (Dr. Kusdi Raharjo, DEA, Ketua Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia)	10
KERJA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAN BISNIS DARI PERSPEKTIF <i>GOOD PUBLIC GOVERNANCE</i> (Dr. Ulber Silalahi, MA, Program Studi Administrasi Publik Fisip Unpar Bandung, Ketua Centre for Public Policy and Management Studies)	20
BAGIAN II HASIL RISET TENTANG KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAN BISNIS	
MODEL AKSELERASI INOVASI DAN NETWORKING SEBAGAI BASIS PENGUATAN DAYA SAING USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI BANYUWANGI (Edy Wahyudi, Kaprodi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Jember)	41
IDENTIFIKASI PERAN STAKEHOLDERS DALAM <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> PELAKSANAAN PROGRAM GENRE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Nur Fitri Mutmainah, S.IP., M.PA, Gerry Katon Mahendra, S.IP., M.I.P, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta)	56
KEMITRAAN PEMERINTAH, SEKTOR BISNIS DAN PUBLIK DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN; STUDI KASUS REVITALISASI SUNGAI CITARUM (Dewi Wijayanti dan Dissa Erianti, Mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial-UNPAR Bandung)	67
GBPs DALAM PELAYAN PUBLIK YANG BERKUALITAS PADA ERA OTONOM DAERAH (Nanang Suparman, Engkus, Fadjar <i>Trisakti</i> , Asep Hidayat), Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung)	82
KAPASITAS GOVERNMENT-BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) DALAM PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL PATIMBAN SUBANG (Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos, M.Si Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang)	93
DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA SEMARANG (Tri Yuniningsih GOVERNMENT - BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) , Neni Sriwahyuni, Departemen Administrasi Publik, FISIP-UNDIP, Jawa Tengah)	112
KEMITRAAN UNM DAN PEMERINTAH LOKAL DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEPALA SEKOLAH (Dr. Andi Cudai Nur, M.Si, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar)	122
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERBASIS <i>FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)</i> SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI <i>GOVERNMENT-BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs)</i> DI	

INDONESIA (Budi Rustandi Kartawinata, S.E., M.M, Prodi Adminsitration Bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom)	146
POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA DAN MASYARAKATDALAM PROGRAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO (Etih Henriyani Lina Marliani FISIP Universitas Galuh Ciamis)	156
HARMONISASI ADMINISTRASI PUBLIK DAN BISNIS, MENINGKATKAN PERANAN ADMINISTRASI DALAM PEMANFAATAN HUTAN DAN LAHAN MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” PENGALAMAN DI RIAU (Dr. Ahmad Tarmizi Yusa; Lilis Suryani; Rosmayani, Universitas Islam Riau)	163
MODEL KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA (Wawan Risnawan, Ahmad Juliarso, Universitas Galuh Ciamis)	193
 BAGIAN III HASIL RISET LAINNYA DI SEKTOR PUBLIK DAN BISNIS	
STRATEGI PROMOSI PARIWISATA KREATIF JEMBER FASHION CARNAVAL (JFC) (Selfi Budi Helpiastuti, Dina Suryawati, FISIP Universitas Jember)	212
PENGARUH KOORDINASI KPA DENGAN KADER WPA TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAPAIAN PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SUMEDANG (Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si, Dhesti Widya Nurhasanah Ningrum, S.Sos., M.Si. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang)	228
PENGUATAN <i>BRAND COMMITMENT</i> PADA PERGURUAN TINGGI: ANALISIS <i>BRAND ORIENTATION</i> DAN <i>BRAND INVOLVEMENT</i> BERDASARKAN <i>CAREER STAGE</i> (STUDI PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) “VETERAN” JAWA TIMUR) (Siti Ning Farida, Nurul Azizah Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur)	244
ANALISIS PENJUALAN DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA (Soedarmanto, STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati)	258
<i>RINGKASAN</i> PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS HASIL PRODUKSI ROTI PLEMBEN, OPAK GAPIT DAN KRIPIK PISANG PADA “UKM NIKMAT” & “UKM HAFIZ” DI DESA BARENG, KEC. BARENG DAN DESA WONOSALAM, KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR (Sri Andayani, Administrasi Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya)	275
PROGRAM SENTRA WISATA KULINER SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SURABAYA (Sri Wibawani, Ertien Rining Nawangsari, Annora Aneriah, Ilmu Adm. Negara, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur).	286
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENJAWAB TANTANGAN PERANG KEAMANAN CYBER NASIONAL (Andriansyah dan Taufiqurokhman FISIP-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan, Evi Satispi FISIP-Universitas Muhammadiyah Jakarta)	292
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN SUMEDANG (Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si, Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang)	317

MENGUKUR DAMPAK STIMULUS PEMASARAN DAN STIMULUS LAINNYA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN RAJUTAN BINONG JATI BANDUNG (Thia Ekawati Liansyah· Fauzan Aziz, Program Studi S1 Administrasi Bisnis, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Indonesia)	332
BIAYA OPERASI DAN DISTRIBUSI PETIKEMAS DOMESTIK TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DI BJTI PORT (Indriana Kristiawati, STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya)	357
PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK (Muhammad Hilman Fikri Mahasiswa Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).	379

HARMONISASI ADMINISTRASI PUBLIK DAN BISNIS, MENINGKATKAN PERANAN ADMINISTRASI DALAM PEMANFAATAN HUTAN DAN LAHAN MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” PENGALAMAN DI RIAU ¹

Dr. H. Ahmad Tarmizi Yussa ,MA , Dr. Hj. Rosmayani, Lilis Suriani S.Sos ,Msi

Email; tarmiziuir@uir.ac.d

ABSTRAK

Bisnis berorientasi hutan berkembang dan marak di Riau. Disamping meningkatkan ekonomi juga perlu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Bisnis telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan konflik. Konflik antara pengusaha dengan masyarakat mulai dari industri hulu sampai ke hilir. Kesannya tidak harmonisasi antara kedua belah pihak, mulai orde baru sampai sekarang. Posisi masyarakat selalu pasif, apatis dan lemah. Idealnya peranan administrasi publik yang mementingkan kepentingan universal, sebagai alat stabilisasi, berperan dalam perubahan sosial, sebagai peluang perubahan manajemen, dan kunci modernisasi masyarakat. Harapan yang besar terhadap reformasi dan otonomi daerah belum menunjukkan hasil yang signifikan mengembalikan hak masyarakat tempatan dan aplikasi pembangunan berkelanjutan. Korupsi hutan lahan tidak dapat dihindari. Hasil kajian menunjukkan konflik antara pebisnis hutan lahan dengan masyarakat setempat sampai hari ini tidak terselesaikan. Diantara sektor yang mengundang konflik adalah industri perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Kemudian pola pemanfaat lahan dalam beberapa tahun terakhir ini beralih ke pulau-pulau dan di tepi pantai. Pola inipun tetap menimbulkan konflik dan bahkan mengancam eksistensi lingkungan pulau-pulau di sepanjang tepian Selat Melaka seperti Bengkalis, Rupat, Pulau Padang dan Pulau Rangsang. Satu hal lagi selain efek abrasi dan hama yang ditimbulkan, juga membuat pulau-pulau disini sukar membangun, proses modernisasinya lambat. Stagnan dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu kasus perjuangan masyarakat adat di Riau daratan yang dulunya milik suku Petalangan, belum lagi tuntas. Masyarakat petalangan dengan sistem adat istiadat tata kelola hutan tanah dan kearifan lokal yang baik justru punah. Padahal pola mengelola hutan tanah mereka dapat dijadikan model pembangunan berkelanjutan yang baik. Disarankan agar pemerintah menjadi mediator yang akuntabel, impartial, objektif, berintegritas, honesty dan right and responsible dengan mengedepankan filosofis administrasi secara sederhana mebina relationship dan mutually pada semua pihak tanpa diskriminasi “impartial” serta berani mereposisi kebijakan yang benar-benar pro publik. Karena intinya kebijakan itu adalah berharap dan menanti. Hanya administrator yang arif dan bijaksanalah selalu menampilkan sikap yang pro publik dan demokratis. Dimana sumberdaya alam dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata.

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional Business, Government dan the Public : Optimalisasi Government-Business Partnership (GBP-s) untuk Tujuan Nasional Pembangunan Berkelanjutan. Bandung 28 November 2018

A. Pendahuluan

1. Latar belakang masalah

Pembangunan nasional memerlukan dukungan daerah. Secara sistemik intinya keberhasilan pembangunan daerah sebagai lokomotif keberhasilan pembangunan nasional. Bagaimanapun pembangunan hari ini perlu dinikmati dikecap oleh generasi mendatang, dan bukan sekedar kenikmatan generasi hari ini dimana mereka juga memerlukan harmonisasi hubungan dengan alam mereka. Pola pembangunan yang governance administrasi perlu menyelenggarakan proses yang humanis, partisipatif dan akuntabel bukan sekedar ekonomis dan efisien. Kemampuan mengadministrasi potensi publik dan privat yang seyogyanya diselenggarakan secara tepat, benar, adil dan merata. Inti tujuan administrasi publik Indonesia mencapai adil makmur dan sejahtera. Semestinya pemerintah sebagai mesin produksi "administrative state" dapat mengeloa aneka sumber daya negara-daerah dan kemudian mengalokasinya secara tepat dan benar.

Aktivitas bisnis yang beorientasi hutan dan lahan dalam lima dekade ini sangat marak di Riau. Budaya bisnis ini dimulai dari era orde baru sampai orde reformasi. Pada era reformasi yang diharapkan itu dimana di daerah dikendalikan oleh rezim pemda yang "otda" berkolaborasi dengan berbagai kekuatan termasuk pusat. Diantara banyak kebijakan adalah regulasi bisnis hutan dan lahan. Spirit berkembangnya bisnis tersebut amat klasik dan sederhana mengangkat ekonomi dan devisa. Namun disebalik itu menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap sistem ekologi administrasi publik. Tidak ayal lagi pengalaman di daerah memberi kesan ketidak berpihak dan inkonsisten mengaplikasikan pembangunan berkelanjutan. Jika bisnis yang lanjut dan berkembang maka dilain pihak justru banyak menimbulkan kerusakan dan penderitaan masyarakat. Ironisnya hari ini kerusakan-kerusakan itu terjadi mulai dari hulu sampai ke hilir.

Aktivitas bisnis Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya ditulis "HTI" menggantung banyak masalah. Mulai dari praktek penguasaan hutan dan lahan sering memicu isu konflik dengan masyarakat lokal sampai polusi yang merusak "lingkungan" ditimbulkan oleh pabrik. Tanpa terasakan justru proses transporasi industri agro bisnis banyak menimbulkan kerusakan prasarana publik dan mengancam keselamatan/nyawa pengguna jalan jalan publik. Belum lagi isu pembakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) dengan berbagai efek yang ditimbulkan bahkan merusak imej negara dimata internasional. Peran pemerintah sebagai agency public administration, sebagai regulator dan administrator publik belum banyak tampil/nampak sampai saat ini. Proses bisnis berlalu begitu saja, sangat dimanjakan tanpa menunjukkan keberpihakan dan keselamatan orang ramai "publik". Seakan potensi bisnis diatas segalanya sehingga pihak-pihak yang memiliki otoritas resmipun banyak diam dan pada memberi reaksi terhadap peristiwa dan kasus yang dirasakan oleh publik. Kesan berpihak terhadap dunia bisnis itu terlalu berlebihan dibandingkan terhadap orang ramai. "publik"

Dalam proses kenegaraan administrasi publik mesti hadir memfasilitasi kepentingan bisnis dan publik. Bila dikaitkan dengan regulasi pembangunan berkelanjutan justru menjadi kontra produktif apabila bisnis menista publik. Mengikuti Gary bahwa peran pemerintah sebagai agen yang melancarkan konsitusi secara smart sangat penting. Dikatakannya peran itu pernah diungkapkan oleh Wilson dikatakan "*running a constitution*" is a public administration that does result in the stable and effective functioning of our political system – in a way that steadily improves the quality our lives and expand both equity and opportunity (Gary, 1990 : 32) diantara sebagai agen yang memiliki perspektif, possible terhadap kepentingan publik dan menyelenggarakan konsitusi dengan proses yang governance.) sebaliknya tidak mencederai proses pemerintah yang tidak pro publik dan tidak terbawa dalam alam politik yang anomali. Tidak sebagai pelaku konstitusi yang distorsi (Tangkilisan, (2003). Pengalaman di Malaysia menurut Ngah, pemda dapat berperan sebagai penggerak ekonomi dan sosial masyarakat setempat melalui peran partisipatif (Kamaruddin Ngah :1996)

Pemerintahan governance hari ini *expertise is a vital source of power all bureaucracies, is equally important, especially in democratic societies, for administrative agency to command strong political support*" (France E. Rourke, dlm Peter kobra, 1993:72) administrasi memerlukan proses kebijakan yang demokratis dan adil untuk menciptakan kesejahteraan publik (Frederickson, 1989). Sampai hari ini negara modern seperti Amerika masih memperhitungkan persialan social equity dalam proses administrasi publik Frederickson (2014). Menurut Bank Dunia beberapa isu pembangunan infrastruktur dan pembangunan institusi diantaranya berkaitan dengan (1) *greening development*, dan (2) *democratization and development* (Word Bank Development Report 1994-p 1-8)

Pembangunan kelanjutan semesti mencerminkan proses pembangunan yang dinikmati oleh semua makhluk secara harmonis dan berkelanjutan. Jangan disatu sisi ada kelompok yang sangat menikmati/diuntungkan tanpa memperdulikan resiko dan efek pembangunan yang dilakukan oleh kelompok mereka sebagai (bisnis) sementara disisi lain banyak orang (publik) yang terkorban atas cara bisnis mereka yang ingin hidup dan menang sendiri. Efek yang perlu menjadi perhitungan antaranya social, bearable. Equitable, enviromental, sustainable viable dan economic. Oleh Word Bank Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai *of opportunity for future generation. Frame work the rule that good governance plays in the true commitment to advancing the sustainable agenda*. Dikutip dari pengalaman di Afrika bahwa pemerintahnya dalam menggerakkan pembangunan berkelanjutan memiliki karekteristik fragile, soft and significance and at the same time predatory in their relationship to the citizenry. Jelas hal proses pemanfaatan sumber daya alam justru memakan diri sendiri bila diselenggarakan secara kolusif dan koruptif. Faktor-faktor memanjakan pemodal tanpa disandari akan menista hak manusiawi secara manusiawi. Oleh Fukuyama dikatakan jika berlaku pembangunan ekonomi dan mutu kehidupan maka pembangunan yang memperhatikan maratabat manusia adalah pembangunan yang seimbang dan lebih sempurna (Fukuyama dalam Embong, 2002).

Riau terkenal sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumberdaya alam yang besar sehingga sering mendapat julukan sebagai “provinsi yang kaya”. Namun kaya belum tau makmur dimana masyarakatnya dapat menikmati sumberdaya alam untuk kesejahteraan. Data terakhir Riau merupakan wilayah administrasi di daratan Sumatra dengan jumlah penduduk 5.8 juta. Luas wilayah 8.702. 000 ha, wilayah hutan seluas 7.121.344.00 a ha dan lahan gambut seluas 3.867.000a ha. (INCAS, *Indonesiaan National Carbon Accounting System*). diunduh tanggal 4 Nopember 2018 pukul 7.21 WIB)

Banyak pengalaman eksplorasi sumber daya alam telah menimbulkan efek eksploitasi. Sumber daya alam menjadi sumber masalah yang sampai hari ini tidak kunjung selesai. Teknik pemafaat sumber daya alam berbagai cara dari satu pola ke pola yang lain selalu menguntungkan korporat hutan lahan “KHL” dan secara nyata tidak berpihak kepada pembangunan berkelanjutan terutama dari pendekatan kemanusiaan. Sumber daya alam yang paling rawan dan rentan masalah adalah hutan dan lahan. Dimana Riau dahulu memiliki lebih dahulu 10 juta hektar hutan yang masih perawan, kemudian dirambah tahun demi tahun sehingga kini tidak lebih dari 6 juta hektar hutan sudah hilang di Riau, yang semula pada tahun 1950 seluas 8.702.366 ha pada tahun 2014 hanya tinggal 2.465.800 ha. Telah terjadi deforestasi seluas 6.236.566 ha. Diantara kebun kelapa sawit seluas 2.290.736 ha. Informasi terakhir sudah 64 juta hutan dan lahan ditebang/babat dan dijarah. Pembabatan hutan dan lahan di Riau melejit drastis dalam jangka waktu 1984-2005 di eksploitasi hutan seluas 3 juta hektar. Tertinggi pada tahun 1999-2005. seluas 840.000 rata 150 hektar pertahun (WALHI

Satu hal yang menarik alasan bahwa perkebunan kelapa sawit di Riau bukan deforestasi akan tetapi adalah reforestasi menanamkan kembali lahan yang terlantar. Pernyataan ini jelas melecehkan pengorbanan eko sistem baik flora, fauna terutama manusia yang berjuang melawan konflik perampasan hak-hak masyarakat asli di daerah- daerah di Riau yang tahun demi tahun tidak kunjung selesai. Belum lagi persoalan kebakaran hutan dan lahan di Riau berdasarkan informasi sepanjang tahun 2018 sebanyak 1.647 ha. (Kompas, 11 April 2018) Kemudian menurut BPBD Riau seluas 2.152. ha. Kebanyakan hutan dan lahan yang terbakar adalah lahan yang dicadangkan untuk penanaman kebun kelapa sawit. Akhir-akhir ini lahan dan hutan yang terbakar sudah ke lahan gambut, karena persiapan hutan lahan yang normal sudah tidak ada lagi. Tentunya efek karhutla sangat luar biasa. Dampak ini mengakibatkan manusia terpapar asap dalam jumlah massal dan proses mobilitas sosial ekonomipun ikut terhambat. Hebatnya pernyataan dari media GAPKI bahwa lahan sawit jutaan hektar di Indonesia itu merupakan proses konversi tanah belukar, lahan terlantar dan HTI. Bukan deforestasi sifatnya namun reforestasi. (Media GAPKI, 27 Februari 2017). Informasi-informasi yang beginilah sering diterima oleh pemerintah pusat melalui foto satelit yang sangat global sifatnya demi kepentingan bisnis KHL yang bercokol kuat dan hebat di Riau.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Scale Up salah satu NGO di Indonesia, menemukan gejala pergeseran eskalasi konflik dari tahun sebelumnya yang didominasi oleh Industri Perkebunan sawit, namun pada temuan di tahun 2009 didominasi konflik di sector industri perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 75,9%, seterusnya oleh industri perkebunan kelapa sawit 20%, industri pertambangan 0,2 %, dan lain-lain 3,9 %. Khusus di sektor industri

kehutanan konflik didominasi antara industry Perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan masyarakat yaitu sebesar 62,9%, di kawasan konservasi 33,3%, antar industry Perkebunan 3,4% dan antar masyarakat 0,4%. Dari 2 (dua) industri perkebunan Hutan Tanaman Industri yang ada di Riau konflik terbanyak terjadi pada PT. Group APRIL yang merupakan induk dari PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) dan Mitranya yaitu sebesar 88% dari total konflik pada HTI dan Group IKPP yang membawahi PT. Arara Abadi (AA) dan mitranya sebesar 12 %. (Sobri, 2015)

Artinya bahwa proses perkebunan jutaan hektar lahan itu tanpa mengorban biodiversiti dan efek budaya adat istiadat dalam sistem komunal masyarakat lokal. Sebuah pernyataan yang menista nilai-nilai manusiawi dan biodiversiti yang sudah lama hidup nyaman utan belantara. dan kontraversi dengan sistem pembangunan berkelanjutan. Kasus lahan “hutan tanah” masyarakat adat Petalangan di Desa Sialang Godang mencapai 15 ribu hektar sampai hari ini belum rampung. Konflik demi konflik terjadi, dan proses peradilan selalu dimenangkan oleh pengusaha. Padahal kekuatan adat yang mendasari perjuangan dalam bentuk “tombo” yang berisikan administrasi dan kebijakan mengelola “hutan tanah” masih tersimpan sampai saat ini. Berbagai dokumen adat dan sejarah menyatakan bahwa posisi masyarakat adat petalangan terhadap hutan tanah adalah kuat. Karena masyarakat petalangan juga disebut orang talang atau orang darat. Norma-norma adat istiadat dan kearifan lokal konsens beripihak pada pembangunan berkelanjutan “melestarikan hutan rimba’ sangat menarik dijadikan model mengadministrasi hutan rimba sebagai objek dan subjek pembangunan berkelanjutan. Namun dengan kekalahan dan posisi masyarakat adat “masyarakat kampung” yang lemah selalu membuat mereka pecundang. Administrasi publik mulai dari orde baru sampai reformasi ternyata masih belum berpihak kepada mereka.

Di Riau lautan, proses penjarahan hutan dan lahan yang ganas dan jahat juga terjadi di era reformasi. Perusahaan-perusahaan besar “raksasa” di Riau ternyata sudah kehabisan hutan alam. Tanaman hutan industri “HTI” di daratan sumatra tidak mencukupi, dan hutan rimba perawan di pulau ini sudah terkikis. Jelas tidak mencerminkan adanya pembangunan berkelanjutan. Dalam banyak peristiwa, konflik dan reaksi-reaksi kontra “menolak” dari masyarakat kampung yang lugu juga mereka selalu pecundang. Pemerintah “daerah” selalu berpihak pada korporat “pebisnis” yang lihai menggunakan potensi. Tidak ayal lagi hutan-hutan di pulau rawa seperti Bengkalis, Rupat, pulau Padang dan Pulau Rangsang sudah berubah menjadi HTI dan kaya kayuan yang masih alam dan perawan itu lenyap tidak tentu arah. Melakukan penanaman kembali tidak ada sama sekali. Sebagian hutan pulau yang perawan berubah menjadi hutan homogen sawait dan akasia. Biodiversiti flora dan fauna di pulau-pulau ini lenyap. Ironisnya lagi pulau-pulau ini adalah pulau deng topografi dataran rendah berawarawa, tanah redang. Pulau-pulau disini terletak di sepanjang selat melaka sebagai pulau sedimen yang rentan terjadi abrasi. Proses penjarahan hutan lahan ini justru semakin menggila terjadi pada era reformasi sekitar tahun 2011. Sampai hari keberpihak pemerintah terhadap komunitas lokal di pulau-pulau itu tidak jelas. Cita-cita masyarakat untuk membangun pulau dengan melakukan kerjasama dengan para investor pun kandas. Untuk melakukan perlawanan mereka sekali lagi lemah, dan tidak berdaya dan akhirnya selalu pecundang.

Hebatnya lagi ekspansi agro industri sudah sampai di tengah-tengah/jantung kota Dumai. Dumai yang dulunya terkenal sebagai kota Pelabuhan alam, pelabuhan suplai minyak bumi internasional sudah beralih menjadi kota industri. Secara drastis tata kota ini khususnya areal pelabuhan menjadi areal industri kelapa sawit. Dimana beberapa pabrik kelapa sawit beroperasi ditengah-tengah kota tersebut. Tentu saja dampak industri yang luar biasa terjadi dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Mulai dari bunyi bising, bau busuk dan kondisi kondisi yang kumuh menimbulkan efek kesehatan/tidak sehat. Disampai itu lalu lintas kendaraan berat bertonage tinggi sangat mengancam keamanan pengguna lalu lintas di kota ini. Bukan hanya itu saja lalu/ transportasi komoditas kelapa sawit dengan ribuan truk tangki setiap hari menyumbat lalu lintas di lintas Sumatra menuju Dumai. Kondisi ini sangat mengganggu dan menghambat proses lalu lintas umum. Sehingga fungsi sosial jalan raya tidak jelas lagi sudah dimonopoli oleh kepentingan bisnis. Disamping sering mengancam keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Jalan Dumai- Pekanbaru yang semestinya hanya dilalu dalam masa tempoh tiga jam sekarang menjadi rata-rata tujuh jam. Artinya kepentingan bisnis sudah sangat mengganggu kepentingan publik. Sementara itu upaya pemerintah untuk menjadikan jalan agar dialihkan ke jalan-jalan khusus tidak ada sama sekali. Apalagi terjadi eksiden kendaraan berat itu di jalan, atau adanya perbaikan jalan, tidak jarang masyarakat pengguna jalan terpaksa tidur/ menginap di jalan. Artinya bisnis agro industri kelapa sawit sudah memonopoli proses kehidupan publik mulai dari hulu sampai ke hilir. Di areal Pelindo Dumai masyarakat sekitarnya sangat berharap adanya upaya memperhatikan kesehatan mereka, melakukan penghijauan dan memitigasi persoalan sosial ekonomi yang stagan oleh tutupan kawasan industri seperti adanya program CSR.

Proses pembangunan yang diharapkan adalah proses pembangunan yang elegan, berkeadilan dan menyeimbangkan antara keuntungan (*profit*) yang diperoleh dengan penghargaan terhadap manusia (*people*) serta konsisten dan komitmen melestarikan dan memelihara bumi (*planet*) yang tata ruangnya diperlukan bersama-sama. Administrasi dalam hal ini selain dijadikan sebagai alat modernisasi dan juga sebagai media dan rujukan penting amengatur proses perubahan, membina spirit solidaritas, bertimbang rasa, berkeadilan sosial (*social equity*) serta membina soliditas kelompok agar tidak terjadi konflik dan eksploitasi atas masyarakat "lingkungan" oleh tindak ekonomi yang mencari keuntungan secara ekonomi semata-mata.

Pemerintah daerah era kini secara konsep yang masih semi dan abu-abu menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Diharapkan memperhatikan dimensi "lingkungan" secara istiqomah. Jika perlu merevisi kebijakan dan merevitalisasi pola aksi bisnis yang monopoli dan tidak humanis. Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; (konsideran point (b). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2. Perumusan Masalah

Semestinya secara ideal para pebisnis hutan lahan “korporat hutan lahan (baca ”KHL”) dapat mengunjuk positif proses kehidupan bersama “cooperative “ yang harmonis dapat hidup serasi berdamping dalam sistem yang semula nyaman penuh saling pengertian “mutually”. Kehadiran mereka tidak menjadi hama pengganggu “parasite” dalam banyak sektor. Sehingga ekologi manusia “human ecology” tidak nyaman dan tidak harmonis. Aneka dampak yang ditimbulkan mulai hulu dan hilir benar-benar direspon oleh pemerintah sebagai agency administrasi publik. Kondisi dari masalah yang dikemukakan diatas mencerminkan bahwa administrasi publik kurang berdaya “terkooptasi” oleh KHL dan mereka sangat dominan menguasai alam. Sehingga kesannya pembangunan berkelanjutan yang secara sederhana adalah proses hidup berdamping secara damai memanfaatkan bumi (planet) dalam proses mencari untung (profit) yang hanya sustainable untuk kepentingan segelintir mereka dan semestinya jika ada mutually kehdairannya tidak mengganggu eksistensi masyarakat (public). Pola pikir pemerintah yang mendewakan investasi perlu disertai dengan sikap responsive dan akuntabel pada kondisi “lingkungan”. Akuntabilitas publik. Dimana pemerintah setidaknya tidak bisa tampil sebagai agent penyeimbang “*equilibrium agent*” yang neutral, cakap dan berwibawa. Memfasilitas kepentingan bisnis yang rakus dengan kepentingan publik “public interest” yang sederhana “sejahtera bersama” sebagai “*welfare society*”

Karena tidak mungkin orang ramai “public” dikorban oleh kepentingan KHL yang hanya segelintir orang saja. Bayangkan deforestasi yang terjadi lebih dari enam juta hektar maka tidak mungkin tidak mengusik kondisi pembangunan berkelanjutan dimana hari ini hutan Riau sudah berubah menjadi hutan homogen sawit dan akasia dalam jumlah yang besar dan proses pembangunan ke depan bisa stagnan dalam jangka waktu yang lama. Dikhawatirkan modernisasi pulau-pulau strategis, pulau terluar di pintu ASEAN akan terhambat.

Rute sulit tetapi apakah akhirnya lebih berkelanjutan, untuk merebut kembali hutan lahan yang sudah dijarah sehingga tidak mencirikan proses sustainable development, “politik hijau” “Green Policy” Ke depan mampukah pemerintah melestarikan hutan primer yang masih tersisa. Enam puluh empat juta hektar hutan telah ditebang dan dirambah selama 50 tahun terakhir. Tidak ada pembenaran ekonomi atau etika selama 64 juta hektar jika hutan lahan sebagai “ekologi manusia” dan makhluk hidup “bio diversity” lainnya akan hilang selama 50 tahun ke depan.

Maka sangat mungkin kiranya jika pemerintah mengembalikan “filosofis administrasi” dalam menjembatani kepentingan banyak pihak terkait bisnis hutan lahan ini sama-sama senang dan sama-sama maju. Karena setelah dua puluh tahun reformasi ditambah dengan praktik bisnis orde baru sebelumnya, tidak banyak persoalan pembangunan berkelanjutan dapat dipecahkan dan wujud mata di depan mata. Kebanyakannya banyak termanipulasi oleh alasan bisnis dan devisa negara. Bertitik tolak dari permasalahan yang diungkapkan sebelumnya, maka semestinya aplikasi yang konsisten terhadap administrasi “pentadbiran” dalam menjadikan model harmonisasi antara administrasi bisnis dengan administrasi publik. Artinya administrasi mesti banyak tampil dengan formula nyata sederhana ditengah-tengah proses pemerintahan

yang benar-benar melayani "rakyat" "public" dan bukan pelanggan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses administrasi pemerintahan hari ini dan kedepan yang benar-benar dapat mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya diawali dengan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita otonomi daerah itu.

3. Tujuan/Kegunaan Penulisan

- a. Untuk mendeskripsi pengalaman dan fakta bisnis hutan lahan di Riau, efek kemanusiaan dalam misi pembangunan berkelanjutan..
- b. Mengungkap sejauhmana komitmen pemerintah era yang reformasi dan otonomi daerah terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan hutan lahan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal
- c. Memberikan rekomendasi dari pendekatan administrasi terhadap proses harmonisasi bisnis dan publik mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bumi Indonesia yang kaya untuk kesejahteraan bersama.

A. Studi Kepustakaan dan dan Literature Review

1. Konsep Administrasi

Leonard D. White berpendapat bahwa administrasi publik adalah "semua operasi yang dilakukan untuk tujuan mengisi atau menjalankan kebijakan negara (dalam Dvorin dan Simon). Penekanan administrasi publik baru, (NPA) membuat kebijakan berorientasi pada keadilan sosial dan kesamarataan sosial untuk mensejahterakan masyarakat (Frederickson, 1981). Krislov dalam Gültekin (2011) menekankan bahwa administrator publik harus kuat dan harus aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan keadilan sosial. Diantara karekter kebijakan yang baik menurut Caiden. selain memerlukan kerangka kerja dan konsep yang baik dan benar juga sangat memerlukan partisipasi masyarakat (Caiden, dalam Thoha, 2011), diantara karekter demokrasi menurut Dahl adalah partisipasi efektif (Robert Dahl, 1982) Mills dalam (Dahl, 2001)) menyatakan, rakyat dapat melindungi hak-hak dan kepentingan mereka dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemerintah dan mereka yang mempengaruhi atau menguasai pemerintahan, hanya jika mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam nenentukan perilaku pemerintah... dan hal itu adalah pemerintahan demokratis.

2. Konsep Birokrasi dan Organisasi

Birokrasi memiliki peranan besar dalam proses kebijakan. Menurut (Lindblom dan Woodhouse, :1993) Memiliki prospek yang hebat untuk inspirasi/konfidensi kerja, untuk itu kebijakan dan penetapan kebijakan yang demokratis dan memfungsikan pelayanan publik korektif, birokrat memiliki andil bahkan semakin memperburuk masalah yang ada dlam proses pembuatan kebijakan. Keijakan publik merupakan pendekatan khusus bagi negara yg dlm keadaan lemah untuk memperbaikinya dari konflik hebat, oleh karena itu kebijakan pemerintah dapat membuat ketegangan sosial semakin memburuk atau menjadi lebih baik) Tammosoli , 2007: 78)

Meskipun kendala mereformasi dan mereorientasi birokrasi adalah Sikap birokrasi yang dikehendaki pada masa orde baru adalah birokrasi konservatif. Jika birokrasi bersifat dinamis dan progress maka dapat dibayangkan betapa ketertiban dan kepastian akan hilang dari kehidupan suatu bangsa. Bangsa manapun di dunia, dan apapun sistem sosialnya dan setinggi apaun tingkat modernistasnya, memerlukan birokrasi yang konservasi (Sarwono, 1992) alasannya Birokrasi adalah organisasi yg memiliki daya jangkau nasional yang kewenangannya menyentuh kehidupan khyalayang umum. Apalagi karena masyarakat luas berpaling pada birokrasi sebagai teladan. Karakter dan watak birokrasi sebagai pelayan yang istiqomah perlu dibina terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama secara adil "social equity and social equility". Justru semestinya standart perilaku mengemuka menjadi "perhatian prioritas/penting. Menampilkan administrasi publik yang merujuk pada karakteristik, *integrity, honesty, objective impartially/political impartially,, right and responsibility.*

Watson (1994), mendefinisikan organisasi sebagai "*organizations are sets of ongoing human relationships.* Sementara Bowey berpendapat bahwa *organizations cannot be conceived without regard to human issues* (Bowey 1980). Dalam (Mutti, C d N and Hughes, W (2001) Stimson mengkonsepsikan sebuah organisasi pelayanan dan bisnis dengan manajemen administrasi yang kuat, sebagaimana dikatakan : "*A robust organization will be fully integrated so as to be effective, which mean adaptability has be thoughtfully built in* (Stimson, 1996). Menurut Bennis organisasi merupakan pembentuk utama kemajuan masyarakat yang seharusnya tampil sebagai arsitek sosial. Aparat pemerintah para arsitek sosial harus merancang kembali organisasi mereka agar dapat merancang masyarakat menurut garis yang lebih manusiawi dan fungsional. Mereka perlu secara singkat mampu menjadi pemimpin bukan manejer (Bennis, 1994)

Anjakan berpikir pada paradigma organisasi baru abad 21. Dikatakan oleh Florent dan Treacy (2005:30) bahwa : "Alokasi sumberdaya diputuskan bersama oleh manajemen lokal dan kantor pusat . Strategi berfokus pada integrasi global dan daya tanggap nasional, struktur terdiri dari suatu jaringan dari organisasi. Orang terbaik yang ada diseluruh penjuru dunia dikembangkan untuk posisi penting yang tersebar dimanapun. Paradigma baru organisasi memerlukan ketrampilan kerja yang lintas fungsi dan lintas budaya. Kompetensi ini adalah penting karena pemimpin global harus tumbuh diatas keunikan dari banyak budaya nasional dan regional.

Gambaran kinerja birokrasi publik hari ini dalam organisasi publik yang kompleks dan rumit. Kondisi dunia hari ini khususnya negara transisi selalu dihadapkan pada persoalan yang dilemmatis . Namun sebuah kenyataan organisasi "ketika menuruni aliran deras, apakah lebih baik melihat kemana anda akan pergi atau terpaksa kepada darimana anda datang. Hodgson dan Crainer dalam buku *The Future Leadership* mengatakan bahwa tugas pemimpin organisasi publik dalam kondisi gelombang dunia yang tidak menentu pada hari ini sangat berat dikatakan dipandang dari pendekatan administrasi. " dari piring spaghetti yang kompleks, akhirnya disusun kembali menjadi helaian tunggal; kenyataan yang kacau dibersihkan, diletakkan dalam uruta-urutan yang kronologis, dan pada umumnya dirapikan

untuk menjadi konsumsi publik. Artinya persoalan yang rumit menimbulkan efek publik yang massal efeknya jangan dibiarkan begitu saja. Keberpihak kepada publik yang mayoritas mesti ditunjukkan dengan proses saling pengertian yang mesti dimediasi oleh pemerintah yang arif lagi bijaksana.

3. Konsep aplikasinya Administrasi Publik.

Jauh sebelumnya John A. Gaus (1947) menyatakan ekologi administrasi publik berkaitan erat dengan setting lingkungan. Artinya banyak faktor lingkungan menentukan eksistensi administrasi public. (Riggs, 1989). Mengutip kamus Webster dikatakan ekologi adalah “ *mutual relations, collectivity, between organism their environment*. Dalam kaitan administrasi dengan lingkungannya Charles Beard dalam Gaus menyatakan *formulated some axioms of government in which environmental change is linked with resulting public administration. any such society itself, is strong proportion to its capacity the administer the functions that are brought into being*. Setiap administrasi yang sukses yang kompleks konsekwensi setiap kesuksesan masyarakatnya sendiri, dengan proporsi yang besar untuk meningkatkan kapasitas dengan mengadministrasikan fungsi-fungsi agar menjadikannya sesuatu yang lebih baik. (Beard, 1947) bahwa administrasi sebagai alat modernisasi sebuah bangsa. Emery dan Giaouque (2014) memetik pendapat Wyser yang mengatakan apabila perkembangan terbaru manajemen akan memunculkan ukuran-ukuran baru maka ianya tidak dapat melenyapkan tradisi logik administrasi publik.

Dalam artian yang filosofis administrasi adalah alat mengatur dan menertibkan proses hidup bersama dimana posisi negara sebagai pengelolanya banyak kepentingan dapat diselaraskan dengan spirit kebersamaan, relasi yang baik dalam proses kebijakan, yang akhirnya membangun sikap penuh pengertian. Sampai saat ini persoalan keberadaan administrasi public menampilkan aksi dan interaksi “publik “ dengan penuh pertimbangan keadilan sosial dan kesamarataan sosial yang mengedepankan hak azasi manusia tetap di tuntutan oleh bangsa modern seperti Amerika sekalipun (Frederickson, 2016) *Local government exist to preserve and protect the right of individual and contribute to welfare of the nation as a whole* (Freman 1968)

Baik administrasi bisnis maupun publik semestinya pada pendaklat filosofis administrasi sebagai alat yang mengatur, menertibkan memfasilitasi proses kerjasama yang humanis dan melalui proses colaborasi untuk cooperative. Karena menurut Wilson pelopor administrasi modern mengkonsepsikan bahwa administrasi adalah “ *human cooperative effort*”. Usaha yang manusiawi dalam kebersamaan. Sementara konsep administrasi menurut Berkley dan Rouse terdiri dalam lima ingredient/komposisi antaranya people-action- interaction- relations dan mutually. People dalam hal ini adalah orang banyak – publik sebagai penikmat planit bumi yang dibutuhkan bersama. Dimana posisi sebagai pemegang amanah “khalifah” di planet bumi ini. Justru karena itu mesti care bersama. Karena sama-sama butuh terhadap bumi ini. Kemudian untuk melanggengkan kehidupan mesti ada sesuatu usaha/kerja/aktivitas dilakukan. Kerja-kerja itu menjadi semakin ringan jika diaktifkan bersama, interaction. Menunjukkan bahwa manusia perlu saling mebina

solidaritas dan soliditas. Tidak menampung sikap ego, ingin hebat, maju dan menang sendiri. Demikian juga dalam bisnis perlu membina tim kerja dan membina relasi keluar dan ke dalam. Justru itu interaksi mesti di langgengkan dan suasana yang harmonis/serasi dengan membina relations. Mengarahkan pada relationship berkomunikasi dengan baik antara sesama tidak menutup diri dan hanya berkomunikasi dengan para pejabat dan pengambil keputusan negara, sehingga menista hak-hak publik. Karena pada relasi yang baik itulah letaknya berkelanjutan- sustainable. Proses eksplorasi hutan lahan selama ini minim partisipasi, tidak terakses publik dan tertutup, tidak mencerminkan transparansi, sangat elitis sifatnya "policy model elit". Sekonyong-koyong publik kejatuhan regulasi yang membawa penderitaan bagi mereka. Penderitaan yang dialami akhir di acuhkan saja oleh KHL dan pemerintah. Kondisi masyarakat diam dan apatis bukan berarti setuju. Tapi diam menyerah setelah dipecundangi oleh regulasi yang tidak memihak pada mereka. Artinya proses bisnis mengabaikan arti penting demokratisasi. Padahal kata akhir dari proses administrasi yang berhasil itu adalah "mutually" membangun sikap penuh saling pengertian, bertenggang rasa dengan kondisi orang lain dan empati. Apabila hal ini tidak menjelma/wujud dalam proses administrasi menandakan ada yang salah dari proses itu.

Elemen pokok dari Administrasi Publik harus melayani publik. Masyarakat berhak mengkritik perilaku pemerintah. Orientasi pejabat pemerintah terhadap kepentingan publik adalah prinsip pokok pemerintah yang demokratik. Dengan sikap pembahasan hati-hati terhadap tanggungjawab mengantarkan kita pada tiga hakekat tanggung jawab (1) tanggungjawab berarti kewajiban legal (2) Tanggungjawab dipandang sebagai kualitas moral (3) Tanggungjawab diartikan sebagai sikap tanggap terhadap sistem nilai orang lain. Dipetik kata bijak tentang kebijakan dari Santosa (2012) *All human wisdom is summed up in two word, wait and hope* (seluruh kebijakan manusiawi dapat diringkas dalam dua kata "Menanti dan Berharap" .

Administrator yang humanis menampilkan kebijakan sebagai proses *human being*, menampilkan moral kemuanusiaan yang tinggi. Apabila kebijakan publik mengabaikan budaya, mencerminkan sistem perilaku yang tidak berbudaya. Apabila kebijakan publik mengabaikan publik mencerminkan pemerintah yang tidak demokratis. Administrator yang bijaksana dan arif mentakrifkan kebijakan sebagai keadilan sama rasa, senasib sepenanggungan, sementara yang otoriter cenderung mewujudkan kekuasaan tanpa belas kasihan, sebagai jalan pintas kepentingan sepihak dan sesaat sifatnya (Teyusa, 2018)

Padahal peranan administrasi selain sebagai alat modernisasi bangsa juga dijadikan sebagai alat memecahkan masalah sosial, serta menstabilkan kondisi bangsa. (Lepawsky,1966) Administrasi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menerangkan watak dan karakter administrasi suatu organisasi/bangsa. (Daniel E. Griffiths, dlm Sutarto : 1982) menurut Wilson bidang administrasi adalah bidang bisnis. Ia terpisah daripada kegelisahan dan kecepatan politik. Administrasi terletak diluar lingkungan politik. Persoalan-persoalan politik bukan persoalan administrasi. Walaupun politik menggariskan tugas administrasi. Ia tidak dibebankan untuk menguasai bidang ini. (Woodrow Wilson " *The Study Of Administration*, 1887. Disiplin Administrasi public pada hakekatnya merupakan satu

disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*) dan management dari usaha-usaha masyarakat. Caiden dlm Miftah (2003)

Dari kutipan berberapa teori diatas jelas bahwa pengaruh kinerja Implementasi kebijakan tidak terlepas dari kualitas aksi dari berbagai pihak terkait melalui tahapan-tahapan tertentu untuk pelaksanaan mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu Nigro dan Nigro (2012: 28-31) mengutip pendapat Charles O, Jones tentang beberapa konsep kunci bagi kebijakan publik diantaranya : (a) Kejadian-kejadian dimasyarakat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda, oleh orang yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda-beda (b) Banyak masalah bisa muncul dari satu kejadian yang sama (c) Setiap orang memiliki berbagai tingkat akses bagi proses kebijakan di pemerintahan (d) Banyak persoalan swasta yang mesti ditindak lanjuti oleh pemerintah (e) Para pembuat kebijakan berhadapan dengan suatu masalah tertentu (f) Masalah dan tuntutan secara konstan didefinisikan dan didefinisikan ulang di dalam proses kebijakan. (g) Pembuat kebijakan kadangkala mendefinisikan persoalan bagi orang-orang yang tidak mendefinisikan masalah tersebut (h) Semua sistem kebijakan memiliki sebuah bias. (h) Tidak ada sistem kebijakan ideal yang eksis terpisah dari preferensi arsitek sistem tersebut. (Nigro dan Nigro, 2012)

Waldo membuat kreteria A good portion of *The Administrative State* yang berkaitan tentang alami berkehidupan yang baik atau dengan visi apa yang baik dilakukan untuk masyarakat dan selalu melihat sesuatu yang baik dan menjadikan lebih baik. Kreteria aksi didasari oleh prosedur dimaknai melalui keputusan kolektif agar menjadi lebih baik. (Waldo dalam Frederikson, 1997) Akhirnya tatkala masyarakat diabaikan dan ternista oleh sistem yang tidak pro terhadap mereka justru terjadi ditengah-tengah gelombang otda maka timbul pertanyaan "Dengan pertanyaan siapa yang berperanan" padahal semestinya Proses menetapkan kebijakan kesannya tdk prosedur secara universal mengedepankan prinsip keadilan dan demokrasi. Diantaranya mengedepankan peran partisipasi masyarakat (Caiden dlm Toha, 2009)

Agar pemerintah bekerja konsisten dalam menjentrai proses pemerintahan, jangan terbawa dalam aliran politik yg tdk normal. (anomaly politics) selain memiliki skill managerial. Maka kompetensi yg dibangun sikap (1) *agency perspective* (dari perspektif badan pemerintahan) (2) *broadest possible public interest* (orientasi sangat luas thdp kepentingan publik yang masuk akal) . (3) *The constitutional Governance process*. (proses tata keloa pemerintahan yang konstitusional. (Gary, 1990)

Administrasi pemda otononomi daerah semestinya menampilkan karekter pemda yang otonom dan desentralisasi. Menurut Sabir, Dennis dan Rondinelli tujuan desentralisasi politik itu diantaranya, Untuk mewujudkan demokrasi penyelenggaran pemerintahan dimulai dari daerah. (Kartiwa dan Nugraha, 2011).; (Alekajbaf dan Jawan, 2011). Silverman menekankan arti penting desentralisasi dalam mewujudkan governance yang terbaik sebagaimana dinyatakan bahwa *Decentralization has the potential to be powerful intrument for better governance*. (Silverman, 1992:4)

Dalam pendekatan governance public policy pada administrasi publik kontemporer digambarkan Almaashi Ibrahim (2015) bahwa typologi pemerintahnya mesti dekat dengan rakyat dan mendefinisikan undang-undang benar-benar klir dan mantap dalam aplikasinya "Government more near the citizen and are defined laws and regulations more clear and better to be applied. Proses kebijakan yang establish dan memelihara good governance menurut PBB parameternya adalah responsive, tranparent, concensus oriented, equitable and inclusive, effective and eficient, follow the rule of law, participatory dan accountable. (Geurts T. 2011) Karakter dan watak pemerintah akan tercermin dari proses pp yg diselenggarakannya karena itu kebijakan memiliki arti yang luas sebagaimana dinyatakan oleh PBB a government's public policy is the set of policies (laws, plans, actions, behaviors) that it chooses (kebijakan pemerintah berisikan sekumpulan kebijakan dalam bentuk, hukum, perencanaan, aksi , perilaku, atas pilihannya) sementara itu menurut Peter bahwa Public policy is "the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the life of citizens". Publik policy sejumlah aktivitas pemerintah, biasanya aksi langsung dilakukan agen atas semuanya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. (Guy Peter, 1998)

Karakter administrasi publik global perlu disikapi dengan baik dalam kontek harmonisasi kepentingan public dengan bisnis. Pola pendekatan para administrator dalam semestinya berubah karena kondisi glabal pemerintah dihadapkan pada "Policy problems faced ...are increasingly complex, wicked and global. Mark Robinson (2015) masalah kebijakan dihadapkan pada semakin semakin meningkat kompleks, Jahat dan mengglobal". Public service reform problems and approaches- How can we make government more honest? Integrity and anti-corruption reforms 1990s to present. Standart perilaku sangat diperlukan. Pendekatan NPG menekankan hubungan antar organisasi, dengan proses tata kelola melalui modal kepercayaan, modal relational berfungsi sebagai inti mekanisme governance. Kemudian menetapkan standard perilku yang parameternya adalah honesty, integrity, impartially/political impartially/objective and rights and responsibility

Justru karena itu dalam menghadap dunia bisnis perlu kehati-hatian, mengantisipasi dengan jeli dan respek, berubah menjadi pemerintah yg responsif dan senantiasa merespon feed back sistem dalam berbagai level struktur pemerintahan dari desa sampai Jakarta. Pola memperhatikan masyarakat yang lebih humanis - care to public. Artinya apapun dilakukan pemerintah modern hari ini muara akhisnya adalah melayani publilik baik langsung maupun tidak langsung. Jangan sampai publik merasa tidak diperhatikan, tidak merasa berarti akan kehadiran pemerintah dan akhirnya mereka bisa mereka tidak ada tempat mengadu di bulan-bulanan. Berjuang menuntut hak dan keadilan lalu pingpong kesana kemari. Akhirnya publik kehabisan energi, jadi tidak administrative karena banyak terjadi pemborosan sumber dalam perjuangan. Cerminan pelayanan yang demokrasi melayan warga negara bukan pelanggan, dan spesifik pemerintah governamnce baru "NPG" adalah pemerintah yang melayani. "governing serving citizens"

Sebenarnya kondisi administrasi publik menjadi semakin pulih dan berkembang setelah 20 tahun reformasi. Bukan sebaliknya sering menampilkan proses politik prematu, ditandai

dengan ketidakmapanaan politik serta kecendrungan masih melanjutkan budaya politik masa lalu. Sebagaimana yang diprediksi Winters tentang kelanjutan politik Indonesia. Dikutip dari Winters tentang prediksi keberlanjutan politik Indonesia pasca orba dikatakan . Poin penting dari oligarki di Indonesia jaringan elit bertahan terus dan punya kemampuan tinggi untuk beradaptasi setiap kali ada perubahan bentuk, struktur atau institusi pemerintahan. Pengalaman Negara transisi dari Negara sedang berkembang ke Negara maju adalah "oligarki dijinakkan". Namun menjatuhkan seorang diktator tidak sama dengan menjinakkan oligarki yang berkuasa. (. Winters. 2004). Kondisi politik lokal maupun nasional yang sedang galau yang dikatakan berada pada arena politik abu-abu "grey zone" , situasi politik di daerah bergelut dalam tiga arena budaya politik yang tidak konstruktif. Pertama, praktek politik patrimonial, kedua praktek politik oligarki dan ketiga jaringan politik para elit yang rakus bokolaborat menguasai sumber-sumber daerah yang disebut "bossim"

Justru itulah menampilkan pemda yang berkapasitas mesti menjadi prioritas. Dikatakan oleh Pollit bahwa reformasi management pemerintahan memerlukan relasi baik dan eksis antara politik dan administrasi. : *'public management cannot be adequately comprehended without reference to crucial relationship that exist between administration and politics and between administrators and politicians.* (Pollits dan Bouckaert, 2004) dikatakan lagi *while there is wide agreement that frontier is an impotent one, there appears to be sharply varying opinions to what is taking place along the borderlines. Some have seen management (is sense modernized public administration plus privatization) invading politics and taking over slice political territory.* (Pollitt and Bouckaert, 2004)

Menurut Rok, pembangunan berkelanjutan yan sifatnya permanen " *The concept of permanent and sustainable development includes much more than only the respect for the natural environment. It is impossible to protect the natural environment without a simultaneous respect for local laws, principles of democracy and participation in the development of the civil society or the pursuit of the elimination of poverty. Hence the belief that an effective development strategy for a company needs to include the economic, ecological and social dimension to an equal extent* (Rok 2010).

Dalam deklarasi Rio de Janeiro pada prinsip 1 dinyatakan : *Human being are the center of concern for sustainable development. They intitled to a healty and productive life in harmonis with nature.* Kemudian pada prinsip 22 dinyatakan tentang pembangunan berkelanjutan sangat penting memperhatikan kearifan lokal, dan komunitasnya, sangat penting memainkan peran manajemen lingkungan karena mereka mengerti dan tau akan tentang praktik tradisional. Budaya dan kepentingan mereka sangat diperlukan mengenable partisipasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Posisi komitmen masyarakat adat terhadap pembangunan berkelanjutan sehingga mereka mendapat prediket masyarakat dunia ke empat.

Perjalanan panjang bisnis hutla di Riau merupakan episode panjang dan menarik untuk disimak bagi perlunya penguatan sistem administrasi publik dan bisnis. semestinya baik bisnis maupun publik tetap menengahkan administrasi sebagai ibu dan landasan filosofis/akademis. dimana bisnis memerlukan publik dan tetap ingin hidup berdampingan dg publik sebagai market baik publik maupun bisnis. apapun alasannya sebuah praktik ap yang berhasil juga dinilai dari keberhasilan mengelola publik “*management puclic sector agency*”, yang pada hari ini walaupun ap mengadopsi prinsip bisnis dlm npm tetapi digunakan utk kemajuan publik. lalu apakah bisnis boleh mengabaikan dan menista kepentingan publik

Etika bisnis “ditandai dengan sikap mengendalikan diri, pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan, mempertahankan diri, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dan menghindari 5k (katabelece - kongkalikong-koneksi-kolusi dan komisi) yang mampu mengatakan benar itu benar. (Dalimunthe, 2004.) Prinsip etika bisnis menurut Josephen dalam Kurniawati (2015)kejujuran, integritas, kewajaran/keadilan, menghargai martabat orang lain, bertanggungjawab, dan dapat dipertanggungjawabkan (Hanie Kurniawati, 2015). Selanjutnya menurut Paulus Etika bisnis menjadi motor penggerak dilaksanakannya TJSP. Bisnis yang bermoral tidak harus berpijak di atas puing-puing kehancuran sesama. Harusnya dipelihara keseimbangan antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai masyarakat, diantara kontrol dan kebebasan, diantara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan masyarakat (Paulus, 2017)

B. Metode Penulisan

Penulisan kertas kerja ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sera eksploratif, mengungkap peristiwa dan fakta-fakta dari pengalaman ekspansi ekonomi elit korporat hutan lahan “KHL di Riau dalam kurun waktu lama’ baik kajian dan kasus eksplorasi hutan lahan pada masa orde baru sampai ke orde reformasi dari sudut pandang administrasi publik dalam fakta dan pengalaman bisnis hutan lahan di Riau. Metoda penelitian secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus juga untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer berhubungan dengan berbagai cara dan bukti melalui dokumen, peralatan, observasi dan manipulasi informal. Dilihat dari cara kerjanya metode penelitian kualitatif deskriptif dapat bekerja pada tataran permukaan (*appearance*) dan juga di bawah permukaan. Kedua cara ini dapat dilakukan (Straus dan Corbin 2003)

Analisis penelitian ini juga untuk meneliti sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui. Dapat mengungkapkan metode yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif. Menurut Kriyantono (2010 : 56), dimana riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Daymon dan Holloway ((2008) menyebut penelitian kualitatif lebih berfokus pada kata, bukan angka, meski ada kalanya angka digunakan untuk menandai frekuensi kehadiran suatu tema dalam transkrip atau terjadinya tindakan tertentu. Menurut Hiilway dalam Mukhtar (2012) Proses penelitian ini mencakup pengumpulan fakta (*fact finding*), penafsiran kritik (*critical interperation*).

C. Pembahasan dan Analisis

1. Pembahasan

Korporat tetap hidup dan berkembang tanpa peduli kondisi di sekitarnya, meskipun mengorban sistem. Masyarakat dengan desa/adat dengan budaya, adat istiadat, ekonomi, sosial dan lingkungan arti fisik (tata ruang) sehingga hari masih ingin berjuang mengembalikan hak dasar mereka tanah adat. Tanpa disadari banyak desa yang hilang “lost of village” untuk peristiwa pemberianm Hak Guna Usaha (HGU) tidak disangka-sangka kantor bupati dan istana siakpun menjadi bagian dari HGU.

Dalam kasus tanah adat masyarakat suku Petalangan di Pelalawan diantara 14.500 hektar tanah adat petalangan yg menjadi lahan HGU PT SP telah memusnah sumber ekonomi bahkan budaya adat istiadat, kearifan lokal yang disakralkan oleh penduduk petalangan yaitu pohon sialang dengan sistem administrasi Kepongan Sialang ikut punah oleh ekspansi bisnis kapitalis. Kearifan lokal kepongan Sialang ini bukan saja menjadi kebanggaan nenek moyang mereka juga dapat dijadikan sebagai model pelestarian lingkungan yang dan efektifhandal dan terbukti bisa bertahan lama. Namun akhirnya punah tanpa bekas oleh ekplorasi ekonomi yang kejam dan rakus. Bahkan disinyalir aksi jahat mereka menghilangkan nyawa tokoh adat penghulu setempat karena menantang keras/ menolak keberadaan perusahaan dan coba mempertahankan tanah adat. Namun kelicikan kapitalis tetap berada pada pihak yang benar dan selalu menang. Perjuangan lebih tiga puluh tahun sia-sia dan selalu pecundang. Karena tidak punya dana perjuangan dan kelompok berjuang sudah pecah belah.

Luas lahan “hutan tanah “ yang hasil dari proses peradilan yang dituntut Pak Rahman Pengulu Setio Dirajo seluas 14.642 ha. Baru diganti rugi seluas 5330 ha sebanyak 607 juta rata-rata pada Thn 1999 mendapat ganti rugi tanaman sebanyak 30 sampai 50 ribu rupiah per KK. Jadi yang masih diganti rugi kurang lebih seluas 9.200 ha. PT SP mendapat HGU tahun 1999 akan tetapi sebelumnya sudah bertanam sawit. Sebanyak 5 Dusun/ kampung yang hilang dari sistem administrasi lama kini disamarkan oleh lahan yang tak berbatas administrative sesuai dengan perizinan. Kemudian pemerintah setempat memekarkan desa- desa disini menjadi 10 desa agar terkesan tidak ada desa yang hilang secara kwantitas. Namun secara faktual wilayah teritorial komunitas adat itu bersama sistemnya sudah punah. Dimana tidak ada lagi pembangunan berkelanjutan. Bukan saja alam hilang secara fisik/tata ruang tetapi juga yang paling penting adalah aspek “human ecology” Hilang bersama dengan tata ruang adalah manusia tua masyarakat adat “orang darat” suku talang. Tidak ada lagi kelanjutan generasi ditanah kelahiran turun temurun. Karen adat kebiasaan mereka sehari-hari banyak bergantung pada “hutan-tanah”

Orang Petalangan juga disebut orang darat atau orang Talang. Talang artinya bambu dimana hutan belantara disini banyak ditumbuh rumpun-rumpun bambu dan suku petalangan banyak memanfaatkan bambu untuk aneka keperluan harian. Kondisi bio diversity baik manusia, flora dan fauna sudah berubah sama sekali. Selama tiga dekade ini sudah berubah menjadi hutan homogen “kelapa sawit”. Mereka sudah kehilangan teritorial sosial dalam sistem kehidupan yg selama ratusan tahun mereka biasakan. Menurut Slater dan Bennis dalam (Wesley G. Mathew , 2000 :4) *social territory of an organization encompasses group, organization, and cultural norm and traditions.*

Hak Publik yg terbaikan kalah dengan pelaku bisnis. Realita perjuangan yang sangat lama administrasi publik seakan tidak tampil dalam berjuang mengembalikan hak masyarakat lapisan bawah "grass roots" di desa-desa. PBK dari sektor budaya masyarakat petalangan hancur oleh aktivitas bisnis PT SP semenjak orde Baru. Padahal PBK sektor budaya adat istiadat melalui kearifan lokal masyarakat Petalangan merupakan model manajemen pelestarian lingkungan yang patut menjadi contoh. Budaya "Kepongan Sialang" yang praktekkan dan pupuk beratus-ratus tahun lamanya musnah oleh aktivitas dan regulasi duet antara pemerintah dan pelaku bisnis. Masyarakat Petalangan di sekitar Desa Sialang Godang tidak lagi memiliki kampung halaman hutan adat yang relatif besar mencapai 15 ribu hektar. Mereka tetap berjuang mendapatkan kembali kampung halaman komunitas adat petalangan. Namun selalu kalah berhadapan dengan korporat bermodal besar. Telah mengadu beberapa kali ke pemerintah daerah dan pusat tapi sia-sia. Pada tahun 2015 coba ikut perjuangan melalui proses peradilan kandas hanya mampu sampai ke pengadilan Tinggi dan kalah. Berjuang memperjuangkan nasib mengharapkan keadilan selalu di dukung oleh embel-embel uang. Berhadapan dengan pemilik modal jelas kalah. Sekarang Pak Rahman pemangku adat yang bergelar "penghulu Sutio di Rajo" itu tetap keras berjuang sampai ke MA. Namun untuk mendapat model perjuangan terpaksa menjadi tukang pakang "broker" membantu menjual tanah kenalan di Indragiri Hulu. Status dari penguasa adat dengan puluhan ribu hektar tanah adat yang pernah dikuasai turun termurun dengan administrasi kepongan Sialang yang dibanggakan sekarang beralih menjadi tukang pakang "broker" tanah kelak terjual sebagai bekal berjuang sampai ke MA. Sekarang Rahman yang kebetulan ASN" Guru berjuang tunggal "solo" karena kawan-kawan seperjuang itu tidak segiat dan seliat Pak Rahman. Pak Rahman juga mulai lelah dan jenuh berhadapan dengan kelicikan dan kejahatan kapitalis PT SP di kampung Halamannya. Sementara kearifan lokal PBK Kepongan Sialang yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau daratan itu, hanya tinggal kenangan. Pohon sialang habitan lebih sudah berganti, sama halnya dengan Hutan di Riau hari tidak lagi heterogen tapi sudah berubah menjadi hutan homogen Kebun Kelapa Sawit dan HTL.

Komunitas lokal tersingkir paksa dan tersungkur meninggalkan ekosistem mereka. Human ecology" hutan tanah sudah musnah bersama sistem adat yang bergantung pada objek itu. Tidak lagi terjadi keseimbangan ekosistem manusia dengan alam putusa mata rantainya. Alam yang semula asli tak terjamah "naturalism" dimana mereka hidup ratusan tahun di dalamnya. Kini sudah berpisah dari kehidupan masyarakat adat di Petalangan. Tidak ada lagi model equilibrium yang semestinya ditampilkan oleh administrasi publik. Komunitas asli, masyarakat adat, kaum pribumi, "sendiri berjuang" dan sampai hari ini diacuhkan. Mengadu kesana sini. tidak diperhatikan. Ini musnah oleh kerakusan dan kelicikan KHL yang memiliki modal besar. Bisa membeli dan mengkooptasi banyak kekuatan. Kolaborasi dan kongsi gelao membuat pihak berwenang para pejabat diam dan bisu. Begitu juga proses peradilan tidak berpihak pada masyarakat setempat. Kalah dan kalah, dipecundangi oleh KHL.

Proses eksplorasi hutan dan lahan di Riau, beberapa lalu beralih dari daratan Sumatra yang sudah habis dijarah, ke pulau-pulau di deretan sela Melaka "pulau sedimen yang berawa-rawa. Kondisi pulau disini amat rentan terjadinya abrasi dan sangat beresiko untuk jangka panjang. Pulau ini juga akan stagnan dalam jangka waktu yang lama. Tidak membangun.

Ekplorasi hutan lahan juga diikuti dengan eksploitasi atas kehidupan dan masa depan penduduk setempat, termasuk budaya dan kearifan lokal yang hilang. Paling nyata adalah sebagian dari pulau-pulau ini akan menjadi pulau yang mati dengan hutan homogen, hutan akasa komoditas bahan baku kertas. Diperkirakan dalam jangka waktu panjang sehingga pulau-pulau berubah menjadi tata ruang statis dan tidak bermasa depan bagi masyarakat disini secara massal. Kenyataan ini jelas tidak memberi peluang untuk eksistensi pembangunan berkelanjutan. Inilah bagian lain dari produk otonomi daerah. ironisnya beberapa pulau seperti Rangsang dan Pulau Padang adalah pulau dari kabupaten pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Kebijakan pemekaran jelas membuat masyarakat berharap dan menanti, kelak daerah ini akan maju luar biasa setelah pemekaran. Apalagi pulau-pulau ini berada dibibir selat Melaka, amat potensial untuk dikembangkan menjadi pulau modern seperti Batam, Karimun dan Bintan. Apakah kebijakan ini sebuah terobosan atau kekoyolan.

Perjuangan masyarakat Pulau-pulau di Riau lautan untuk mempertahankan hutan dan lahan di desa mereka, selalu kandas. Akibatnya tidak terjadi disharmonisi antara pelaku bisnis dengan penduduk lokal. Penduduk dan lingkungan terancam. Terancam tidak berkembang dalam jangka waktu lama. Dimana sebelumnya lingkungan sebagai aneka sumber kehidupan, ekonomi, budaya adat istiadat dan kearifan lokal. Jangankan harmonisasi lingkungan dengan masyarakat, untuk melanggengkan pembangunan bernuansa hijau "green politics" dengan kearifan lokal tidak lagi mungkin terjadi. Kesenangan dan kearifan lokal mereka terbayar mahal dan terpaksa korban yang sangat besar. Hilang dan musnahnya desa, dusun, kampung halaman " *damage of Village* " berubah menjadi kawasan tanaman industri dan kelapa sawit.

Mahidin tokoh adat Rangsang mengaku menyerah dan menurutnya para pelaku bisnis hutan lahan "KHL" sangat kuat. Mereka bukan saja bisa melumpuhkan masyarakat yang tidak kompak seperti komunitas kami di Rangsang, bahkan Pemda sendiripun tak berkutik. Beberapa kali terjadi reaksi masyarakat agar mereka tidak menjarah dan merajah-rajah pulau ini menjadi HTI akan tetapi ternyata proyek tidak tidak ramah lingkungan itu tetap jalan. (Mahidin, 22 September 2018). Akibat lain katanya para calon investor pun enggan berinvestasi kesini, karena kondisi lahan disini tidak seperti dulu. Keinginan awal kami disini ingin jadi petani yang berhasil. Apalagi kami dekat dengan Malaysia maka kami jejak kemungkinan ada peminat dari sana jadi investor. Namun dalam perundingan jadi kandas karena sekonyong konyong ada proyek HTI dengan keputusan sepihak yang meluluh lantakkan alam dan semangat kami. Itulah nasib kami. Katanya. Untuk melawan dan bereaksi pertama kami tidak kompak kedua kami tidak kuat melawan kekuatan mereka. Akhirnya kami diam dan pasrah. Artinya situasi proses eksploitasi huthla di Riau bukannya tidak ada reaksi dari publik akan tetapi mereka diposisi yang lemah selalu kalah, dan ketidak berpihak penguasa dan petugas terhadap mereka sengat jelas. Mereka sudah pasrah dan menyadari jika mereka melawapun pada sistem kapitalism ini sangat kuat akan sia-sia. KHL itu kokoh dan liat. Akhirnya rakyat akan tetap kalah dan usaha mereka tetap eksis dan survival. Artinya pembangunan berkelanjutan hanya dalam kontek memperkaya para pebisnis hutan lahan "KHL"

Pada saat suasana berkecamuk, disaat terjadi penolakan dari masyarakat terhadap masuknya pengusaha HTI, datang dua oknum *Green Peace* orang barat katanya Pak Mahidin. Mereka datang membawa alat menilai tanah, dan kemudian hasil pemeriksaan dikatakan (1)

tanah pulau disini labil dan merupakan pulau endapan (sedimen) (2) humus tanah habis dan kanal yang dibuat membelah pulau akan memperburuk kontur tanah disini.. Menurut Pak Mahidin Tanah disini sudah mulai retak-retak dan pada musim Utara dan Timur pantai runtuh lama kelamaan akan sampai ke kanal. Menurut nya analisis dua person *green peace* yang datang beberapa tahun lalu ke desanya bahwa efek terhadap lingkungan dan kondisi fisik tanah sedimen di pulau ini akan luar biasa. Menurut Mahidin bahwa pohon kelapa yang menjadi andalan penduduk pulau Rangsang sudah mulai tidak subur lagi dan sudah diserang oleh hama penyakit. Ia menduga sebagai efek hama akasia sebagaimana yang di prediksi oleh anggota *Green Peace* tempo hari.

Akhirnya banyak desa yang berubah menjadi desa HTI. Menurut Mahidin desa-desa yang digarap HTI diantaranya desa Tebun, Repan, Kemalasari, Teluk Samak dan Tanjung Samak Kiri. Sebelum masyarakat sudah mulai ingin mengembangkan kampung dengan membentuk Koperasi Buana Rangsang, dan menyiapkan Proposal utk bekerjasama dengan investor utk memajukan Rangsang. Garapan area/lahan Koperasipun sudah di etahui dan disetujui Pak Camat Rajito. Diantara proses yang sudah mulai area kerjanya di desa Gayung Kiri, Kampung Tengah, Kampung Baru semua surat menyurat tanah sudah disiapkan dengan Pak Camat termasuk Badan Hukum koperasi. Tapi sayang keinginan mereka ingin maju kan ekonomi kampung gagal setelah masuk perusahaan IKPP. Kami tak kuasa melawan perusahaan. Kami rakyat kecil dan mereka punya backing yang kuat. (Mahidin, 20 September 2018) . namun hari ini sudah mulai kami rasakan efeknya. Kesannya pohon akasia di HTI ada hama yang bisa menular ke tanaman lain. Di Kampung Baru pohon kelapa masyarakat sudah banyak yang mati pucuk dan lama kelamaan tumbang.

KHL memang licik. Isu menarik yang dimanipulasi oleh perusahaan bahwa di pulau-pulau yang mereka garap hutan dan lahannya adalah pulau yang tidak berpenghuni. Padahal di pulau Padang dari dua kecamatan jelas pulau yang dihuni oleh masyarakat. Namun mereka sudah memasukkan alat berat sebanyak 1025 dan eskavator untuk menjarah pulau sedimen itu sebagai lahan HTI yang terlebih dahulu memanfaatkan kayu alami yang sudah beberapa abad hidup di pulau itu. Walau bagaimanapun bahwa bupati Meranti seakan-akan kaget dengan kejadian itu (4 Mei 2011) bahwa secara prosedural izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Masyarakat menantang dan mengadu kesana sini. Karena tidak digubris di daerah “gerak bisu” menjahit”. Coba mengadu ke Jakarya, ke DPR RI dan Kementerian Kehutanan.dan LH Juga tidak digubris dan tidak ada penyelasain. (28 April 2011). Mereka berdemo dengan alasan “ Menyelamatkan Pulau Padang dan Pulau Rangsang” PT LUM, SRL. (Sumber Serikat Tani Nasional, Jumat 6 Mei 2011) thema “ Pemerintah Harus belajar Mendengar “ Indonesia Harus Mampu menyelamatkan Pulau Padang- Tolak HTI RAPP.

KHL sangat licik membungkam para tokoh dan orang-orang berpengaruh di Riau, sedangkan pengalaman Pak Datok Mahidin tokoh LAMR di tingkat kecamatan saja coba dibungkam dengan cara memujuk belia uagar diam dan di iming-iming jadi mandor di gaji 7 juta/bulan. Menurut nya lagi para aparat diberi jatah, seperti kades 100 Juta setahun.

Akhirnya lama kelamaan semakin terasa, dampak terhadap pulau-pulau di pinggir selat Melaka. Sebuah demonstrasi masyarakat dan mahasiswa di kantor DPRD Riau yang

temanya "Tolong selamatkan desa kami" itulah jeritan dan laungan pada demonstran yang berdemo pada tanggal 34 September 2018 baru-baru ini. Kedatangan para petani dan nelayan di tiga kabupaten yakni Meranti, Indragiri Hilir dan Bengkalis. Mereka datang ke Pekanbaru menyampaikan keluhan kondisi pulau kampung halaman mereka. Artinya kondisi puluhan desa pantai di tiga kabupaten tersebut perlu perhatian karena sudah terjadi abrasi dalam jumlah yang relatif luas. (Tribune Pekanbaru, 25 September 2018). Justru itulah pemanfaatan pulau sedimen yang terdiri dari gambut dan rawa juga semestinya dilakukan dengan hati-hati.

Masih di pulau-pulau provinsi Riau terjadi konflik lahan antara masyarakat Pulau Rupert dengan PT SRL. . Warga dua desa menuntut pengembalian lahan di kawasan konsesi perusahaan HTI tersebut. Warga dari dua desa yang berada di Pulau Rupert yakni, Desa Pergam dan Desa Mesim Kecamatan Rupert mendesak (SRL) mengeluarkan lahan yang diklaim milik para warga sedang digarap perusahaan perkebunan. mengelola dan menggarap lahan yang diklaim sebagai milik mereka. "Masyarakat di dua desa ini sangat resah. Selain persoalan tapal batas antara lahan milik masyarakat dengan perusahaan yang tidak jelas, mereka juga mencemaskan jika areal lahan kelompok masyarakat ini dirambah perusahaan," ujar Sugianto, Ketua Komite Pimpinan Kecamatan Serikat Tani Riau (STR) Kecamatan Rupert.,

Di kecamatan Pinggir Bengkalis semenjak tahun 1991 kawasan yang terdiri dari 5 Desa atau kampung disini dijadikan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dari PT AA. Dimana lima Desa menanggung akibatnya yaitu Desa Beringin, Teluk Betong, Tasik Serai, Melibur, Lubuk Lembut. Di kawasan ini diperkirakan terdapat ratusan ribu hektar hutan dan kampung masyarakat yang inklaaf menjadi HTI AA. Sudah tentu kampung halaman dan lahan kehidupan masyarakat disini terancam dengan ekspansi hutan yang sedemikian besar untuk kepentingan pihak pengusaha AA. Menurut Pak Mohd Syarif yang bertindak sebagai Kepala Dusun Tua dan sesepuh masyarakat tempatan. Semenjak kawasan ini aktif beroperasi tangkapan ikan masyarakat disepanjang Sungai Mandau mulai punah dan sangat berkurang. Ini disebabkan pupuk pohon akasia yang keras, sehingga mematikan ikan-ikan disini.

Pengalaman yang menarik tentang pembangunan berkelanjutan dan sepek terjeng KHL, juga terjadi di jantung kota Dumai. Proses industri agro efek lingkungan tidak termitigasi melalui perhatian dan kepedulian terhadap penduduk setempat di tengah-tengah kota dan pelabuhan internasional. Semestinya melalui penerapan CSR sesuai Perda Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 dapat memberi perhatian pada masyarakat setempat dan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapp Perda ini tidak berfungsi bahkan tidak tersosialisasi. Pemerintah provinsi/kota tidak berperan serta, tidak menunjukkan sikap tegas, tidak bertanggung jawab dan sebagiannya dilakukan dilakukan kurang transparan. Mengatasnamakan CSR.

Anehnya meskipun bisnis menimbulkan banyak kesan/dampak negatif dan serius terhadap lingkungan, namun manajemen bisnis tidak familiar dan tidak komunikatif dengan lingkungan. Menutup diri dari komunitas. Kawasan industri dijaga ketat bagaikan kamp militer. Bahkan tidak bersahabat dan penuh rasa curiga.

Belum ada upaya serius dari pemerintah setempat untuk memfasilitasi proses bisnis yang pro publik dan mensosialisasi perlunya etika bisnis. Dalam konteks CSR tidak terjadi komitmen dalam melaksanakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan. Padahal baik perda maupun undang-undang mewajibkan perusahaan yang bergerak dari sumber daya alam

diwajibkan melaksanakan TJSP secara terprogram, berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Semestinya pelaku bisnis menyadari bahwa publik juga membutuhkan planet bumi ini. Ironisnya semakin otda semakin menjadi-jadi kejahatan ekonomi pelaku bisnis terhadap “lingkungan” dan mengabaikan arti penting pembangunan berkelanjutan demi menyelamatkan bumi dan isinya. Proses reklamasi yang tidak partisipatif menimbulkan efek banjir di Kota Dumai. Karena beberapa anak sungai dan parit saluran primer ditutup oleh pengusaha yang menjalankan operasi di pelabuhan di jantung kota Dumai. Tepatnya di sepanjang pantai utara Dumai jalan Datuk Laksamana. Mencakup tiga kelurahan Laksamana, Dumai Kota dan Buluh Kasap

Sampai hari ini belum ada upaya memfasilitasi proses bisnis yang pro publik dan mensosialisasi perlunya etika bisnis diantaranya mengaplikasi TJSP sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sosial. Upaya mitigasi dapat setidak-tidaknya perlu secara konsistensi melaksanakan TJSP secara terprogram, berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Semestinya pelaku bisnis menyadari perlunya hidup berdampingan dengan penuh pengertian dan damai. Kemudian menyadari bahwa publik juga membutuhkan planet bumi ini. – ironisnya semakin otda semakin menjadi-jadi kejahatan ekonomi pelaku bisnis terhadap “lingkungan” dan mengabaikan arti penting pembangunan berkelanjutan demi menyelamatkan bumi dan isinya

2. Analisis

Spirit otonomi memberi kewenangan yang besar kepada Pemda, lebih besar dari permasalahan yang timbul oleh diskresi mereka. Otonomi memiliki esensi menyelesaikan masalah masyarakat daerah secara lebih cepat dan tepat. Karena persoalan spesifik dan keunikan ekologi administrasi daerah idealnya Pemda yang mengetahui dengan jelimet dan tuntas. Semestinya mencermati persoalan dari fenomena bisnis KHL dan dampak luar biasa yang ditimbulkan timbul sikap respek dan akuntabilitas kepada public di daerah. Tidak teraplikasinya akses public ke perusahaan, yang menutup diri tidak mau peduli dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat komunitas setempat merupakan tantangan pemda sebagai fasilitator dan mediator yang cakap memainkan peran komunikasi administrasi publik. Terkesan pemda kabupaten kota tidak memfasilitasi dampak dan tuntutan masyarakat termasuk menuntut hak hutla dimana perkara “kasus hutla” banyak yg statis dan tidak progress meskipun otonomi daerah sudah dua dekade lamanya. Banyak hak-hak masyarakat, baik individu maupun komunitas tidak terselesaikan, dimana berpuluh-puluh tahun berjuang menuntut hak, tapi tidak ada penyelesaian setidak-tidaknya titik terang. Walaupun besar harapan masyarakat pada otonomi daerah dan berkepemimpinan putera daerah sebagai tuntutan reformasi disayangkan tidak terjadi kemajuan yang signifikan baik tampil sebagai fasilitator atau yang lebih ekstrim lagi, meninjau kembali jauh dan memperbaiki kebijakan. Hal ini perlu dalam rangka membangun wibawa administrasi publik yang governance menampilkan akuntabilitas publik.

Persoalan ini mungkin tidak hanya terjadi di Riau saja. Semestinya ada upaya pemerintah pusat meninjau kembali dan merevitalasi kebijakan yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan tidak pro manusia. Tidak humanis, dan menyimpang dari filosofis pembangunan sosial. Banyak persoalan pengusahaan hutan dan isinya di Inonesia.

Carthy menggambarkan tersingkirnya masyarakat asli di Kalimantan Tengah dengan cara mobilisasi dan pemaksaan agar masyarakat adat tersingkir dari habitat mereka, dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang terstruktur dan masif. Pola yang paling ampuh adalah alasan meningkatkan ekonomi nasional, meskipun jelas-jelas telah meluluh lantakkan ekonomi masyarakat tradisional, orang asli dan pribumi, (McCarthy, 2007). Praktek-praktek ini penguasaan hutan lahan memang hebat, sehingga tidak terbaca sebagai praktek *illegal logging*, diantaranya perambahan hutan di Rupert mengatasnamakan pesantren seluas 5500 hektar menghabiskan APBD untuk land clearance. Hutan rimba yang perawan pupus sementara pesantren tidak muncul sama sekali. (Teyusa, 2010. Akan tetapi fakta hutan punah dan eko sistem rusak dan bahkan hak-hak publik lokal terhadap hutan dan lahanpun terabaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Colfer dan Resodarmo dalam (Nurdjana dkk: 2005:64) desentralisasi kehutana bukan memperbaiki situasi justru semakin memperburuk keadaan lingkungan hutan dan lahan dan menjadi ajang korupsi.

Meskipun dari kepentingan pengusaha KHL dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan seakan tidak menimbulkan pengorbanan sistem hutan dan lahan. Akan tetapi pada hakekatnya justru terjadi konflik dengan masyarakat setempat terutama masyarakat adat atau orang asli. Ketika mereka mengabaikan aspek pembangunan berkelanjutan. Kesan ingin hidup dan senang/menang sendiri.

Direktur WALHI Riau, Hariansyah Usman mengatakan, penyelesaian konflik lahan saat ini hanya ada di atas kertas tanpa eksekusi di lapangan "Pembiaran konflik tanpa solusi inilah yang menaikkan situasi pada level perang. Ini artinya berkeinginan menghancurkan lawan atau menghalalkan secara cara. Masyarakat yang tidak memiliki modal semakin tertekan oleh pemodal besar yang memiliki relasi di pemerintah. Masyarakat frustrasi. Tidak percaya pada alat negara untuk membela mereka," ujar Zazali kepada Mongabay (Mongabay Indonesia), July 31, 2012 3:19 am

Banyak peneliti dan para LSM mengambil perhatian terhadap pengabaian hak-hak masyarakat terhadap hutan dan lahan. Karena masyarakat asli orang tempatan sebagai masyarakat agraris juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan dan lahan. Justru karena itulah para peneliti dan pemerhati luar negeri juga mengambil penting persoalan dan efek ekspansi ekonomi potensi hutan lahan. Sebagaimana dikatankan Hai (2013) *While concern over deforestation was the initial focus. The impact of deforestation on the lost biodiversity, land and social conflict*

Inti kebijakan desentralisasi kehutanan memastikan agar pemerintah daerah dapat melayani masyarakat tempatan dengan lebih baik. Otonomi daerah belum dapat memberikan manfaat pengelolaan hutan kepada masyarakat daerah bahkan peningkatan eksploitasi hutan justru mengancam kerusakan hutan yang lebih besar (Colfer dan Resosudarmo dalam Nurdjana, 2005) Data Jikalauhari menunjukkan dalam tiga tahun 2009-2012, Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta hektare),

Sebenarnya administrasi dapat dijadikan sebagai menjadi media penyelesaian masalah memfasilitasi antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Catatannya bagaimana kita sebagai bangsa yang bertamadun memandang bahwa administrasi itu penting dan bisa berperanan dalam berbagai proses kehidupan, karena sifatnya yang universal. Diantara peranan

yang bisa dimainkan oleh administrasi adalah sebagai alat perubahan sosial, memecahkan konflik, kepentingan bersifat universal, peluang revolusi manajemen dan kunci modernisasi bangsa (Lypawski, 1966), ini dapat dipakai sepanjang administrasi dihargai dan dirasakan penting oleh siapapun terutama penguasa. Rasa tanggung terhadap public sebagai amanah "mandate" bagi administrator sangat perlu. Apalagi menyelesaikan konflik dan mengembalikan hak public sebagai warga negara. Karena itu dari pelayanan public baru bukan melayani pelanggan/pengusaha akan tetapi melayani warga negara (*people*). Oleh karena itu menerapkan elemen pokok dari Administrasi Publik harus melayani publik. Masyarakat berhak mengkritik perilaku pemerintah. Orientasi pejabat pemerintah terhadap kepentingan publik adalah prinsip pokok pemerintah yang demokratis. Dengan sikap pembahasan hati-hati terhadap tanggungjawab mengantarkan kita pada tiga hakekat tanggung jawab (1) tanggungjawab berarti kewajiban legal (2) Tanggungjawab dipandang sebagai kualitas moral (3) Tanggungjawab diartikan sebagai sikap tanggap terhadap sistem nilai orang lain. Dipetik kata bijak tentang kebijakan dari Santosa (2012) dipetik dari Sentos *All human wisdom is summed up in two word, wait and hope* (seluruh kebijakan manusiawi dapat diringkas dalam dua kata "Menanti dan Berharap" . Begitu besarnya harapan public terhadap administrator yang *governance*. Administrasi jangan dipolitisir termasuk politik ekonomi yang merusak tatanan ideal administrasi. Menurut Wilson administrasi yang banyak campur tangan politik justru akan menimbulkan kegelisahan/kekacauan. Administrasi itu merupakan bidang bisnis. (Wilson 1887). Sampai hari ini administrasi public dengan paradigma NPM memberikan penekanan pada (a) culture millieu organization (b) strengthening local level institution (3) promoting accountability in public management.

Administrasi public sebagai agency penyelenggara negara tidak bisa lepas dari isu organisasi publik dalam berbagai level. Mesti merespon isu-isu penting menyangkut kepentingan publik. Baik dari pendekatan good governance, new public management, maupun new public governance. Watson (1994), mendefinisikan organisasi sebagai "*organizations are sets of ongoing human relationships*". Sementara Bowey berpendapat bahwa *organizations cannot be conceived without regard to human issues* (Bowey 1980). Artinya pemerintah tidak boleh mengabaikan/acuh dengan isu-isu kemanusiaan dan terlalu berorientasi dan memanjakan kepentingan bisnis oleh segelintir KHL.

Dalam kaitan administrasi dengan lingkungannya Charles Beard dalam Gaus menyatakan *formulated some axioms of government in which environmental change is linked with resulting public administration. any such society itself, is strong proportion to its capacity the administer the functions that are brought into being*. Setiap administrasi yang sukses yang kompleks konsekwensi setiap kesuksesan masyarakatnya sendiri, dengan proporsi yang besar untuk meningkatkan kapasitas dengan mengadministrasikan fungsi-fungsi agar menjadikannya sesuatu yang lebih baik. (Beard, 1947) bahwa administrasi sebagai alat modernisasi sebuah bangsa. Emery dan Giauque (2014) memetik pendapat Wyser yang mengatakan apabila perkembangan terbaru manajemen akan memunculkan ukuran-ukuran baru maka ianya tidak dapat melenyapkan tradisi logik administrasi publik.

Pendekatan pemerintah yg terlalu berorientasi pada kekuasaan dan sikap penguasa semestinya beralih ke sikap adminisrtrator yang humanis. "*Human cooperative effort*" (Wilson:1887) membina *relationship* dan *good understanding* "mutually (Berkley dan Rouse, 1997). Baik administrasi bisnis maupun publik semestinya kembali merujuk pada model sederhana pendekatan "filosofis administrasi" sebagai alat yang mengatur dan , menertibkan. Salah satunya menampilkan proses sosialiasi untuk menyadarkan para pebisnis "KHL" akan perlunya kepedulian lingkungan dan tanggungawab sosial. Dua pendekatan etika perlu mengedepan dari proses bisnis para "KHL" tersebut. pertama pendekatan etika administrasi public melalui standart perilaku seperti Impartially, honesty, integrity, objective dan right and responsibility serta akuntabilitas public. Menurut Mark Robinson (2015) administrasi publik paradigma "NPM" yang reformasi setelah tahun 1990 mengaplikasikan "*How can we make government more honest? Integrity and anti-corruption reforms 1990*"

Etika bisnis tidak menista komunitas atau masyarakat, karena bagaimanapun public adalah sasaran produksi dan pemasaran. Banyak energy "public" diperlukan dalam proses bisnis. Maka tidak mungkin mengabaikan kekuatan sosial, ekonomi dan budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat dimana bisnis beroperasi. Amat tidak etis tentunya. Etika bisnis "ditandai dengan sikap mengendalikan diri, pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan, mempertahankan diri, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dan menghindari 5k (katabelece - kongkalingkong-koneksi-kolusi dan komisi) yang mampu mengatakan benar itu benar. (Dalimunthe, 2004). Bisnis menjadi motor penggerak dilaksanakannya TJSP. Bisnis yang bermoral tidak harus berpijak di atas puing-puing kehancuran sesama. Haruslah dipelihara keseimbangan antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai masyarakat, diantara kontrol dan kebebasan, diantara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan masyarakat. (Paulus, 2017). Bila dikaitkan dengan isu pembangunan berkelanjutan maka jelas hasil konfrensi dan deklarasi Rio de Jeneiro pada perinsip 1 dinyatakan : *Human being are the center of concern for sustainable development. They intitled to a healty and productive life in harmonis with nature.*

Kemudian membangun komunikasi yang elegant dan tidak menutup diri dari lingkungan dimana mereka menjalankan operasi, sedangkan polusi/resido selalu disuplai ke masyarakat dengan berbagai efek yang dirasakan. Mungkin melalui pendekatan CSR/TJSP dapat meringankan "memitigasi" penderitaan dan kesusahan mereka. Tentunya proses ini memerlukan campur tangan pemerintah sebagai agen komunikasi administrasi public, pemimpin transaksional dan sekaligus transformasional. Bagaimanapun efek diskresi atau regulasi dari buah tangan pemerintah perlu dipertanggungjawabkan. Setidak-tidak melakukan pendekatan dalam bentuk sosialisasi kepada para KHL tentang etika bisnis perihal membina sikap perlunya membuka diri membina relasi dengan masyarakat setempat. Sembari menyampaikan kepada mereka perihal banyaknya efek yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis hutan lahan mereka. Setidak-tidaknya memperhatikan/mengambil perhatian terhadap kondisi prasarana jalan umum yang hancur oleh proses bisnis KHL tersebut. Maka wajar jika ekonom seperti Ezra Mishan dalam (Andre Gorz, 2003)menyatakan : "jika kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan ikut dimasukkan ke dalam perhitungan, maka "pertumbuhan" memberi tanda kemerosotan dan bukan perkembangan". Biaya yang ditimbulkan lebih tingginya daripada keuntungan yang ia berikan

Administrasi merupakan proses memfasilitasi kerjasama yang humanis dan melalui proses kolaborasi untuk kooperatif. Menurut Wilson mahagutu/pelopor administrasi modern mengkonsepsikan bahwa administrasi adalah “ *human cooperative effort*”. Usaha yang manusiawi dalam kebersamaan. Sementara konsep administrasi menurut Berkley dan Rouse terdiri dalam lima ingredient/komposisi. Diantaranya *people- action- interaction- relations dan mutually*. People dalam hal ini adalah orang banyak – publik sebagai penikmat planet bumi yang dibutuhkan bersama, sekaligus posisi sebagai pemegang amanah “khalifah” di planet bumi ini. Justru karena itu mesti memelihara “care bersama”. Karena sama-sama butuh terhadap bumi ini. ”. Mahatma Gandhi dalam satu kata filosofinya tentang alam mengatakan: “ Dunia ini sanggup memenuhi kebutuhan manusia, tapi akan tidak sanggup memenuhi kehendak orang yang rakus.” filsafat Melayu tentang perlunya mencintai alam. “*Tanda ingat kemasa datang, merusak alam ia berpantang- Siapa mengenang anak cucunya, bumi yang kaya takkan di rusaknya*”.

Kemudian untuk melanggengkan kehidupan mesti ada sesuatu usaha/kerja/aktivitas dilakukan. Kerja-kerja itu menjadi semakin ringan jika diaktifkan bersama, *interaction*. Menunjukkan bahwa manusia perlu saling membina solidaritas dan soliditas. Tidak menampung sikap ego, ingin hebat, maju dan menang sendiri. Demikian juga dalam bisnis perlu membina tim kerja dan membina relasi keluar dan ke dalam. Justru itu interaksi mesti di langgengkan dan suasana yang harmonis/serasi dengan membina *relations*. Mengarahkan pada *relationship* berkomunikasi dengan baik antara sesama tidak menutup diri dan hanya berkomunikasi dengan para pejabat dan pengambil keputusan negara, sehingga menista hak-hak publik. Karena pada relasi yang baik itulah letaknya berkelanjutan- *sustainable*. Proses eksplorasi hutan lahan selama ini minim partisipasi, tidak terakses publik dan tertutup, tidak mencerminkan transparansi, sangat elitis sifatnya “*policy model elit*”. Sekonyong-koyong publik kejatuhan regulasi yang membawa penderitaan bagi mereka. Penderitaan yang dialami akhir di acuhkan saja oleh KHL dan pemerintah. Kondisi masyarakat diam dan apatis bukan berarti setuju. Tapi diam menyerah setelah dipecundangi oleh regulasi yang tidak memihak pada mereka. Artinya proses bisnis mengabaikan arti penting demokratisasi. Padahal kata akhir dari proses administrasi yang berhasil itu adalah “*mutually*” membangun sikap penuh saling pengertian, bertenggang rasa dengan kondisi orang lain dan empati. Apabila hal ini tidak menjelma/wujud dalam proses administrasi menandakan ada yang salah dari proses itu.

D. Penutup : Kesimpulan dan Rekomendasi.

1. Kesimpulan.

Dampak bisnis terhadap publik lokal di Riau perlu menjadi perhatian. Ternyata reformasi dan otonomi daerah tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat yang dizalimi oleh KHL dan jaringannya. Artinya keberadaan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan aneka dampak yang ditimbulkan. Bukan saja berpengaruh pada persoalan kemanusiaan. Sosial dan ekonomi bahkan memberikan akibat yang luar biasa terhadap musnahnya sistem adat, kearifan lokal di daerah. Untuk mengembalikan situasi alam dan adat yang hilang sangat sukar. Apalagi bila pemerintah tidak

menganggap penting hal-hal tersebut. maka keberadaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perlu ditindak lanjuti segera untuk mengamankan sisa-sisa hutan dan sumber daya alam di Riau atau merespon kondisi yang sudah ada agar pembangunan berkelanjutan setidak-tidak terkesan mengedepan persoalan kemanusiaan, dan tidak terlalu memanjakan pelaku KHL yang sudah banyak menista warga tempatan, terutama masyarakat adat yang lemah dan selalu pecundang dalam perjuangannya.

Justru orde reformasi/otda semakin memperburuk situasi. Sekali lagi gerakan/aktivitas bisnis mengeksplote Sumberdaya alam hutan lahan mengancam sumber kehidupan masyarakat agraris/urban. Mengubah tata ruang dalam waktu lama/stagan Merusak sumber ekonomi masyarakat, timbul efek polusi, menghancurkan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal. Menimbulkan efek kerusakan hulu-hilir. Intinya masyarakat tersingkir terjadi marginalisasi dan menutup ruang gerak komunitas. Tidak ada upaya mereposisi kebijakan "policy modification" meninjau dan mengevaluasi dampak bisnis terhadap publik lokal. Diperlukan budaya pemerintahan yang kembali mengedepankan filosofis administrasi, agar kepentingan bisnis dan public dapat difasilitasi dan terjadi harmonisasi kedua sektor tersebut. diantaranya membina sikap berelasi yang baik dan membangun sikap mutually. Agar proses aktivitas, interaksi dari semua warga negara dapat harmonis dan langgeng. Jangan lagi menampilkan sikap penguasa, dengan kekuasaan yang bisa terkooptasi oleh kepentingan bisnis sehingga mengorbankan public dan lingkungan secara massal menista arti penting pembangunan berkelanjutan.

2. Rekomendasi

Perlu mengintegrasikan etika bisnis dengan etika publik, dimana peran administrasi publik mencerminkan pemerintah yg amanah dan pro publik. Karena publik peminjam kekuasaan "pemberi otoritas resmi kepada pemerintah" sehingga legitimate. Meskipun kasus-kasus yg terjadi disemai oleh pemimpin masa lalu, semoga dengan kekuasaannya rezim komited diharapkan bisa menunjukkan sikap amanah yang pro publik lokal yang sampai hari ini tetap mencari keadilan. Proses AP/pemerintah terkesan bisu dan tidak mendengar. Dalam kasus-kasus ini para penegak keadilan seakan tidak tampil ditengah-tengah mereka. Padahal administrasi publik baru mencerminkan administrasi memerlukan proses kebijakan yang demokratis dan adil untuk menciptakan kesejahteraan publik. Begitu pula manajemen publik baru memperkuat institusi lokal, mengedepankan akuntabilitas publik . semakin maju peradaban semakin dituntut tipologi pemerintah demokrasi, dan akhirnya kembali ke entitas demokrasi. Menampilkan karakter pemerintah yang melayani rakyat. Meskipun perkembangan administrasi public luar biasa, jika tidak hati, kadangkala termakan oleh gelombang bisnis yang licik dan jahat. Belajar dari pengalaman negara-negara maju menjadikan administrasi adalah kunci modernisasi bangsa, proses pertembungan bisnis dan publik perlu mencari soko guru yang selama ini administrasi menjadi ibu kedua disipilin tapi juga kadang terlupakan oleh watak bisnis yang mengabaikan etika bisnis. Administrasi" diharapkan mampu menjembatani bisnis dengan public. Oleh karena itu pendekatan filosofis administrasi, etika bisnis dan pembangunan

berkelanjutan perlu diaplikasikan untuk menjembatani persoalan kepentingan bisnis hutan lahan di maneja oleh KHL untuk menampilkan proses kerjasama bisnis dan public yang lebih harmonis. Disarankan agar pemerintah sesegera mungkin menginventarisasi potensi konflik dan sumberdaya dijadikan sebagai sumber ekonomi masyarakat di daerah. Dalam hal ini sebelum menuntaskan permasalahan, perlu menampung aspirasi secara partisipatif melalui proses pemetaan masalah dan pola penuntasan yang pro publik lokal.

Keberadaan partisipasi public dalam bisnis untuk membuat public dan pemerintah tampil sebagai subjek dan bukan objek bisnis KHL. Persoalan apa yang terjadi seperti kolusi antara pemerintah dan KHL sudah tidak menjadi rahasia public lagi. Kelicikan mereka diketahui diantaranya memegang orang-orang penting yang akhirnya diam dan takluk dengan bisnis mereka. Padahal pengorbanan "lingkungan" secara sistem sudah luar biasa, dirasakan banyak efek yang timbul dari kerakusan mereka. Maka dari itu perlu di ke depankan standar perilaku, audit lingkungan yang serius, membuka akses public dengan KHL agar mereka menyadari dan peduli akan efek yang ditimbulkan. Pola pikir pemerintah yang hanya berorientasi investasi, kepentingan sesaat, mengambil jalan pintas menggarap sumber daya alam jelas sangat menimbulkan efek disharmonisasi dan sukar mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara benar dan kaffah. Pemerintah daerah/pusat perlu konsisten dan tidak setengah-setengah. Diantaranya kebijakan yang perlu didukung adalah segera mengaplikasikan peraturan presiden tentang pembangunan berkelanjutan dan moratorium perkebunan kelapa sawit secara tegas dan konsisten.

E. Daftar Pustaka

- Caiden. Gerald. 1991. *Administrative Reform Come Ages*. Walter Gruyter. New York.
- Cooper. J Philip . (dkk) 1998. *Public Administration for the Twenty First Century*. Harcourt Brace College Publishers. USA.
- Gaus M. Jonh . 1947. *The Ecology of Public Administration*. University of Alabama Press.
- Dahl A. Robert, 1992. *Demokrasi Ekonomi* (terj) Setiawan Abadi. Yayasan Obor . Jakarta
- Dalimunthe Rita. 2004. *Etika Bisnis, -usu repository@2004 Universitas Sumatra Utara*.
- Effendy Tennas. 2010. *Kearifan Pemikiran Melayu*. Pemko Kota Pekanbaru – Universiti Malaya. Yayasan Tennas Effendy. Pekanbaru
- Embong Abdul Rahman. 2003. *Pembangunan dan Kesejahteraan . Agenda Kemanusia Abad 21*. Penerbit UKM. Bangi – Selangor Daruh Ehsan.
- Freeman . T W. 1968 *Geography and regional administration*. . Hutchinson university library. London
- Gaventa John dan Valderrama Camilo, 2001 *Partisipasi, Kwargaan dan Pemerintah Daerah, Lokakarya Meningkatkan Partisipasi dalam Pemerintah daerah*” Jakarta, New Economics Foundation, *The British Council*
- Kets de Vries dan Elizabeth Florent-Treacy. 2005. . *Kepemimpinan Global dari A sampai Z*. (ed) Subir Chowdhury.” Organisasi Abad 21 (terj) aty Cahayani. Indeks. Jakarta
- Kurniawati Hanie 2015. . *Literature Review : Pentingkah Etika Bisnis Bagi Perusahaan*. Politeknik Negeri Bandung.
- Lepawsky. Albert. 1965. *Administration. The Art and Science of Organization and Management*.. Edited by v. O. Key, fr., Harvard University Oxford & IBH Publishing co. First Indian edition. Calcutta
- Manning Nick dan Parison Neil. 2004. *International Public Administration Reform, Implication for Russian Federation*. Washington Dc. Word Bank.
- Mukhtar. 2012. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi. Jakarta.
- Nurdjana dkk. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar
- Paulus Lilik Kristianto. 2017. . *Etika Binis Dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Fakultas Ekonomi UKRIM
- Pecaric. Mirko 2011. *Administrative culture Hrvatska I Komparativna Javna Uprava*, god. 11. (2011.), br. 2., str. 379–409.

- Christopher Polliy dan David Held Pollit. 2007. *“Democracy and Bureacracy, . “ New Form of Democracy*, London : Sage Publications.
- Randall P. White, Philip Hodgson dan Stuart Crainer. 1997. *The Future of Leadership. Masa depan Kepemimpinan Revolusi Gelombang* (terj) Hari Suminto. Interaksara.
- Santosa, Pandji 2012. *Adminsitrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika aditama. Bandung
- Rigg. FW. 1985, *Studi Perbandingan Administrasi Negara*. (terj) Baysaruddin Noer. FISIP Universitas Riau. Pekanbaru.
- Rondenelli A. Dennis. 2007. *Government Serving People : The Change Roles of Public Administration in Democratic Governance*. United Nation
- Sebahattin Gültekin. Volume: 8 Issue: 2 Tahun: 2011. *Manajemen publik baru: Apakah itu benar-benar baru?*.
- Sobri. *Kunflik Kekerasan Antara Masyarakat Melayu Tambusai dengan PT Torganda Property*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 4 April 2011.
- Strauss Anselm dan Corbin Juliet. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. (terj) Mohammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tamura. Juji , 2003. *Redistribution policies for the rural poor of developing countries. Toward more equitable development*. University of Malaya Press. Kuala Lumpur.
- Tarmizi Ahmad. Ahmad 2014. *Riau Dalam Percaturan Masyarakat Ekonomi Asean “MEA” Belajar dari Pengalaman Kebijakan Masa Lalu*. Jurnal Siasat Volume 7 April 2014. Page 18-32
- Tarmizi Ahmad .. *Restorasi Koperasi Unit Desa, Sebuah Pendekatan Teori Organisasi*. Prosiding Seminar Nasional Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. UGM Yogyakarta. 8 Oktober 2016
- Tarmizi. Ahmad Jurnal Siasat Edisi 4 Taun II, Juli – Desember 1997 “Manejemen Asap” Tantang Administrasi Negara dalam Percaturan Politik EKonomi.
- Tarmizi. Ahmad 2010. *Reformasi Administrasi Publik dan Pembangunan Daerah dalam Pemerintahan Daerah Era Otonomi Daerah “ Suatu Kajian di Kabupaten Bengkalis. Propinsi Riau (2000-2005)*. Tesis Ph.D. Universiti Utara Malaysia. Sintok Kedah Malaysia
- Teoh Cheng Hai. 2013. *Malaysian Corporations As Strategic Player in Southeast Asia's Palm Oil Industry*. (Ed) Oliver Pye and Jayati Bhattacharya. *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia. A. Transnational Perspective. ASEF-IQA and ISEAS*. Singapore.
- The Rio Declaration of enviroment and development) the united Nations Confrence on Enviroment and development Having met at Rio de Jeneiro from 3 to 14 June 1992.)*

- Thoha Miftah Thoha. 2011. *Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prada Media Group. Jakarta.
- Wakdo Dwight. 1986. *Pengantar Studi Public Administration*. (terj) Slamet W. Admosoedarmo. Aksara Baru. Jakarta.
- Wesley. G. Matthei G. Wesley. 2000. *Managing The System, How The Change The System*. Synergy Books International- SAM Publishing Sdn Bhd. Kuala Lumpur.
- Willson W " *The Study of administration*. 1887. (ed) Jay M. Shafritz dan Hyde. C. Albert. *Classic of Public Administration*. Moore Publishing Company. Illinois. USA
- William A, Stimson. 1996. *The Robust Organization. Transforming Your Company Adaptive Design*. Irwin Professional Publishing. Chicago.
- Winters A. Jeffrey. 2004. *Orba Jatuh, Orba Bertahan. Analisa Ekonomi-Politik 1998-2004*. Djambatan. Jakarta
- Tribune Pekanbaru, edisi 25 September 2018 .



Program Studi Administrasi Publik dan
Program Studi Administrasi Bisnis
FISIP Unpar



SERTIFIKAT

diberikan kepada

Dr. H. Ahmad Tarmizi Yusa, MA.

atas partisipasinya sebagai

PEMAKALAH

SEMINAR NASIONAL

"BUSINESS, GOVERNMENT, AND THE PUBLIC: Optimalisasi Government-Business Partnership (GBPs) di Era Disruptif dan Governansi Digital untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan"
FISIP Unpar, 28 November 2018

Ketua Penyelenggara

Dr. Ulber Silalahi, MA.

Dekan FISIP Unpar



Dr. Pius Sugeng Prasetyo